

**BERITA DAERAH KOTA CILEGON**



**TAHUN : 2025**

**NOMOR : 21**

---

**PERATURAN WALI KOTA CILEGON**

**NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN**

**PEMERINTAH KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CILEGON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, perlu adanya tolak ukur dan standar biaya umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pengaturan mengenai estándar biaya umum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota cilegon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.

6. Sekretaris ...

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Standar Biaya Umum adalah merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
11. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA/ Kuasa PA adalah kepala Perangkat Daerah atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat APBD Kota Cilegon adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

14. Aparatur ...

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah personil PNS yang berasal dari luar Pemerintah Kota Cilegon seperti Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya.
19. Non PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah orang atau pegawai Non PNS yang bekerja di luar Pemerintah Daerah seperti Kementrian dan Lembaga Pemerintah Lainnya.
20. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

21. Pejabat ...

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
26. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

28. Bendahara ...

28. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
29. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD. Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
30. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
31. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
32. Narasumber atau Pembahas adalah pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.
33. Moderator adalah pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan kegiatan sejenis. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

34. Pembawa ...

34. Pembawa Acara adalah pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk untuk memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan kegiatan sejenis.
35. Panitia adalah Pegawai ASN atau non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.
36. Tenaga Ahli adalah seseorang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya.

#### Pasal 2

Standar Biaya Umum ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan kebutuhan biaya Perangkat Daerah atau sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum digunakan dalam hal:
  - a. perencanaan APBD, dan
  - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

(3) Dalam ...



- (3) Dalam pelaksanaan anggaran dimaksud pada ayat (1) huruf b, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, adanya kenaikan harga pasar, dengan ketersediaan alokasi anggaran serta memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

## BAB II

### STANDAR BIAYA UMUM

#### Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Standar Biaya Umum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat atau Daerah serta berlaku pada seluruh Perangkat Daerah; dan
  - b. Standar Biaya Umum selain standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan muatan lokal serta hanya berlaku di Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. satuan biaya honorarium;
    - 1. honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan;
    - 2. honorarium ...

2. honorarium pengadaan barang dan jasa;
  3. honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKOBJ); dan
  4. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia.
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya pemeliharaan;
  - f. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, pembawa acara profesional;
  - g. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang sifatnya dapat melebihi standar biaya;
  - h. satuan biaya konsumsi rapat yang sifatnya dapat melebihi standar biaya;
  - i. satuan biaya jasa kantor;
    1. honorarium tenaga kerja kontrak dan tenaga harian lepas;
    2. jasa tenaga keamanan dan tenaga kebersihan;
    3. jasa tenaga keamanan pasar dan tenaga kebersihan pasar diberikan berdasarkan pada tempat kerja dan kondisi kerja pada lingkungan pasar, tenaga keamanan patwal, dan tenaga keamanan sekolah;
    4. honorarium gaji 13 dan gaji 14;
    5. uang lembur;
    6. honorarium tenaga instruktur, fasilitator, tenaga pengisi acara dan sambutan;
    7. satuan biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung;
    8. beban jasa iklan/reklame, film dan pemotretan;
    9. beban tagihan telepon, air, dan listrik;
    10. beban langganan jurnal/surat kabar/ majalah;
    11. beban jasa jalan/tol;
    12. jasa penyelenggaraan acara;
    13. satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
    14. beban ...

14. beban jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga;
  15. beban honorarium rohaniawan lainnya;
  16. beban paket pengiriman;
  17. beban registrasi / keanggotaan; dan
  18. belanja jasa kalibrasi.
- j. satuan biaya barang pakai habis;
  - k. biaya jasa insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - l. satuan biaya sewa sarana mobilitas darat;
  - m. satuan biaya iuran jaminan/ asuransi;
  - n. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor lainnya;
  - o. biaya jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - p. biaya transport darat perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - q. satuan biaya beasiswa pendidikan ASN.
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sifatnya dapat melebihi standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil, meliputi :
- a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, khusus biaya tiket pesawat, taksi dan transportasi darat dari ibu kota ke kota dalam provinsi yang sama; dan
  - c. satuan biaya jasa kantor; khusus biaya konsumsi rapat.
- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dipergunakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas ...

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Tenaga Kerja;
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i. Dinas Lingkungan Hidup;
  - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah;
  - k. Dinas Perhubungan;
  - l. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - m. Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian;
  - n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - o. Sekretariat Daerah;
  - p. Sekretariat DPRD;
  - q. Inspektorat Daerah;
  - r. Kecamatan dan Kelurahan;
  - s. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  - t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - u. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - v. Badan Kepegawaian dan Pengendalian Sumber Daya Manusia;
  - w. Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
  - x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Rincian Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rincian Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan pelaksanaan APBD, maka dapat dilakukan perubahan standar biaya umum.
- (2) Perubahan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cilegon.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 23) beserta perubahannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 4 Juli 2025  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA CILEGON

STANDAR BIAYA UMUM YANG MENGACU PADA KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT ATAU DAERAH SERTA  
BERLAKU PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan yang  
tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap  
satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola  
penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen  
Pelaksanaan Anggaran (DPA), diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna  
Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (PPK SKPD);
- e. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara  
Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap  
satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola  
penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen  
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola  
lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud  
sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran  
didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing

- DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
  - c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
    - 1. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
      - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
      - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
    - 2. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
    - 3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
      - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
      - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
    - 4. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
    - 5. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1  
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.040.000,-



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.450.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.970.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.250.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.770.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.290.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.330.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.370.000,-
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.010.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.210.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.410.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.210.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.520.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.140.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.140.000,-
3.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.010.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.210.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.410.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.210.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.520.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.140.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.140.000,-
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 400.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 480.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 570.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 770.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 880.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 990.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 2.830.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 3.230.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 3.620.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 4.420.000,-
5.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 340.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 420.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp. 500.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 570.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 670.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp. 770.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp. 860.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp. 1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp. 1.550.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp. 1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp. 2.470.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp. 2.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.160.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.840.000,-
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 260.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 310.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 370.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 430.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 570.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 640.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 810.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 980.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 1.840.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 2.090.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.350.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.860.000,-

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2  
Honorarium Pengadaan Barang / Jasa  
(Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 680.000,-

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3  
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  
(Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp. 680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp. 850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp. 1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp. 1.780.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 2.120.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 2.790.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	Rp. 4.940.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	Rp. 5.560.000,-
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp. 760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp. 760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp. 920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp. 1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp. 1.600.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 2.820.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 5.010.000,-
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	OP	Rp. 450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp. 450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp. 450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OP	Rp. 480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp. 600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	Rp. 1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.960.000,-

1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal: menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang / jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 4  
Honorarium Pengguna Anggaran

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.940.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 5.560.000,-
2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 5.010.000,-
3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.960.000,-

#### 1.2.4 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.



Tabel 5  
Honorarium Perangkat  
Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala	OB	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp. 750.000,-

1.3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia,

1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas;

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual
2. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Tabel 6  
Honorarium Narasumber/ Pembahas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000,-
3	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000,-
4	Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000,-
5	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000,-

### 1.3.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

Tabel 7  
Honorarium Moderator

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Moderator	OK	Rp. 700.000,-

### 1.3.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

Tabel 8  
Honorarium Pembawa Acara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000,-

1.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 9  
Honorarium Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,-
2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp. 400.000,-
3	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
4	Anggota	OK	Rp. 300.000,-

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim

dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi (dalam jumlah Orang)		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
2. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
3. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

- 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 10  
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan  
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.250.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	d. Wakil ketua	OB	Rp. 850.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 750.000,-
	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 750.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 700.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 650.000,-
	d. Wakil ketua	OB	Rp. 600.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 500.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000,-
2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,-
	b. Anggota	OB	Rp. 220.000,-

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 11

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli Dan Beracara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp. 1.800.000,-
2	Honorarium Beracara	OK	Rp. 1.800.000,-

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

Tabel 12

Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. SLTA	OB	Rp. 2.100.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.400.000,-
	c. Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.600.000,-
	d. Master (S2)	OB	Rp. 2.800.000,-
	e. Doktor (S3)	OB	Rp. 3.000.000,-

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 13  
Honorarium Rohaniawan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp. 400.000,-

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan



secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4 Honorarium penulis artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/bulletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/bulletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Tabel 14  
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
1.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 500.000,-
	b. Redaktur	Oter	Rp. 400.000,-
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 300.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,-
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 200.000,-
1.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 400.000,-
	b. Redaktur	Oter	Rp. 300.000,-
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 250.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-
1.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000,-
	b. Redaktur	OB	Rp. 450.000,-
	c. Editor	OB	Rp. 400.000,-
	d. Web Admin	OB	Rp. 350.000,-
	e. Web Developer	OB	Rp. 300.000,-
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-

#### 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 15  
Honorarium Penyelenggara Ujian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 240.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5.000,-
1.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp. 190.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 270.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 7. 500,-

#### 1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang

bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Tabel 16  
Honorarium Penulisan Butir Soal  
Tingkat Provinsi/ Kabupaten / Kota

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA		
1.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	Rp. 100.000,-
1.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000,-
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000,-

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

- 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang

melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 17  
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000,-
1.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 300.00,-
1.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 200.000,-
1.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp. 5.000.000,-
1.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,-
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp. 400.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	4) Anggota	OK	Rp. 300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 675.000,-
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp. 600.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 450.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 900.000,-
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	Rp. 800.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 600.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 600.000,-

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 18  
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp. 3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	Rp. 3.000.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 1.300.000,-
2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp. 900.000,-
	c. Anggota	OB	Rp. 600.000,-

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilakukan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) Ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan kabupaten bogor (kecamatan cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar Kota)
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan di dalam kota terdiri dari atas :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

## 2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

### 2.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi :

- a. keperluan uang saku,
- b. keperluan transportasi lokal; dan
- c. keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.



Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Tabel 19  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp. 360.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
3.	RIAU	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
5.	JAMBI	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
9.	BENGKULU	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
11.	BANTEN	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 530.000,-	Rp. 210.000,-	Rp. 160.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
17.	BALI	OH	Rp. 480.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 140.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 130.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
26.	GORONTALO	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
31.	MALUKU	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
33.	PAPUA	OH	Rp. 580.000,-	Rp. 230.000,-	Rp. 170.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 140.000,-

2.1.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Tabel 20  
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-

2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Tabel 21  
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp. 4.420.000,-	Rp. 3.526.000,-	Rp. 1.294.000,-	Rp. 556.000,-	Rp. 556.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4.960.000,-	Rp. 1.518.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 530.000,-	Rp. 530.000,-
3.	RIAU	OH	Rp. 3.820.000,-	Rp. 3.119.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 852.000,-	Rp. 852.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 4.275.000,-	Rp. 1.854.000,-	Rp. 1.037.000,-	Rp. 792.000,-	Rp. 792.000,-
5.	JAMBI	OH	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.337.000,-	Rp. 1.212.000,-	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 5.236.000,-	Rp. 3.332.000,-	Rp. 1.353.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 650.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 5.850.000,-	Rp. 3.083.000,-	Rp. 1.571.000,-	Rp. 861.000,-	Rp. 861.000,-
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 4.491.000,-	Rp. 2.067.000,-	Rp. 1.140.000,-	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-
9.	BENGKULU	OH	Rp. 2.071.000,-	Rp. 1.628.000,-	Rp. 1.546.000,-	Rp. 630.000,-	Rp. 630.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3.827.000,-	Rp. 2.838.000,-	Rp. 1.957.000,-	Rp. 622.000,-	Rp. 622.000,-
11.	BANTEN	OH	Rp. 5.725.000,-	Rp. 2.373.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-
I 2.	JAWA BARAT	OH	Rp. 5.381.000,-	Rp. 2.755.000,-	Rp. 1.006.000,-	Rp. 570.000,-	Rp. 570.000,-
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp. 5.850.000,-	Rp. 1.490.000,-	Rp. 992.000,-	Rp. 730.000,-	Rp. 730.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 4.242.000,-	Rp. 1.480.000,-	Rp. 954.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 5.017.000,-	Rp. 2.695.000,-	Rp. 1.384.000,-	Rp. 845.000,-	Rp. 845.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 4.400.000,-	Rp. 1.605.000,-	Rp. 1.076.000,-	Rp. 664.000,-	Rp. 664.000,-
17.	BALI	OH	Rp. 4.890.000,-	Rp. 1.946.000,-	Rp. 990.000,-	Rp. 910.000,-	Rp. 910.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.648.000,-	Rp. 1.418.000,-	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-
I 9.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.493.000,-	Rp. 1.355.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 550.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2.654.000,-	Rp. 1.538.000,-	Rp. 1.125.000,-	Rp. 538.000,-	Rp. 538.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 4.901.000,-	Rp. 3.391.000,-	Rp. 1.160.000,-	Rp. 659.000,-	Rp. 659.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4.797.000,-	Rp. 3.316.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 540.000,-	Rp. 540.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.188.000,-	Rp. 1.507.000,-	Rp. 804.000,-	Rp. 804.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.188.000,-	Rp. 1.507.000,-	Rp. 804.000,-	Rp. 804.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 4.919.000,-	Rp. 2.290.000,-	Rp. 924.000,-	Rp. 782.000,-	Rp. 782.000,-
26.	GORONTALO	OH	Rp. 4.168.000,-	Rp. 2.549.000,-	Rp. 1.431.000,-	Rp. 764.000,-	Rp. 764.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 4.076.000,-	Rp. 2.581.000,-	Rp. 1.075.000,-	Rp. 704.000,-	Rp. 704.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4.820.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.020.000,-	Rp. 732.000,-	Rp. 732.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2.309.000,-	Rp. 2.027.000,-	Rp. 1.567.000,-	Rp. 951.000,-	Rp. 951.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 2.475.000,-	Rp. 2.059.000,-	Rp. 1.297.000,-	Rp. 786.000,-	Rp. 786.000,-
31.	MALUKU	OH	Rp. 3.467.000,-	Rp. 3.240.000,-	Rp. 1.048.000,-	Rp. 667.000,-	Rp. 667.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 3.440.000,-	Rp. 3.175.000,-	Rp. 1.073.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
33.	PAPUA	OH	Rp. 3.859.000,-	Rp. 3.318.000,-	Rp. 2.521.000,-	Rp. 829.000,-	Rp. 829.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 3.872.000,-	Rp. 3.212.000,-	Rp. 2.056.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-

- Catatan :
- a. Ketentuan Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri diatur sebagai berikut:
    - 1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;

2. untuk pejabat eselon III ke bawah, penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
  3. Jika pelaksana perjalanan dinas, berbeda jenis kelamin maka diberikan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- b. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

### 3. SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

#### 3.1. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - 1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
  - 3. Jika pelaksana perjalanan dinas, berbeda jenis kelamin maka diberikan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor sebagai berikut:

Tabel 22

Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp. 346.000,-	Rp. 403.000,-	Rp. 1.075.000,-	Rp. 749. 000,-
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 276.000,-	Rp. 365.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 641.000,-
3.	RIAU	OP	Rp. 225.000,-	Rp. 335.000,-	Rp. 690.000,-	Rp. 560.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 230.000,-	Rp. 360.000,-	Rp. 790.000,-	Rp. 590.000,-
5.	JAMBI	OP	Rp. 271.000,-	Rp. 364.000,-	Rp. 1.008.000,-	Rp. 635.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 245.000,-	Rp. 310.000,-	Rp. 987.000,-	Rp. 555.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 268.000,-	Rp. 384.000,-	Rp. 860.000,-	Rp. 652.000,-
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 261.000,-	Rp. 373.000,-	Rp. 836.000,-	Rp. 634.000,-
9.	BENGKULU	OP	Rp. 250.000,-	Rp. 373.000,-	Rp. 973.000,-	Rp. 623.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp. 305.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 925.000,-	Rp. 705.000,-
11.	BANTEN	OP	Rp. 395.000,-	Rp. 468.000,-	Rp. 919.000,-	Rp. 863.000,-
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 426.000,-	Rp. 530.000,-	Rp. 1.110.000,-	Rp. 956.000,-
13.	D. K.I. JAKARTA	OP	Rp. 433.000,-	Rp. 510.000,-	Rp. 1.216.000,-	Rp. 943.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 232.000,-	Rp. 309.000,-	Rp. 749.000,-	Rp. 541.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp. 230.000,-	Rp. 405.000,-	Rp. 963.000,-	Rp. 655.000,-
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 357.000,-	Rp. 406.000,-	Rp. 1.784.000,-	Rp. 763.000,-
17.	BALI	OP	Rp. 375.000,-	Rp. 490.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 865.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 368.000,-	Rp. 530.000,-	Rp. 1.001.000,-	Rp. 898.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 308.000,-	Rp. 388.000,-	Rp. 1.088.000,-	Rp. 696.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 337.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 810.000,-	Rp. 737.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 317.000,-	Rp. 487.000,-	Rp. 1.267.000,-	Rp. 804.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 264.000,-	Rp. 360.000,-	Rp. 930.000,-	Rp. 624.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 274.000,-	Rp. 365.000,-	Rp. 863.000,-	Rp. 639.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 274.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 848.000,-	Rp. 624.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 273.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 870.000,-	Rp. 623.000,-
26.	GORONTALO	OP	Rp. 215.000,-	Rp. 393.000,-	Rp. 1.338.000,-	Rp. 608.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 264.000,-	Rp. 382.000,-	Rp. 856.000,-	Rp. 646.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 290.000,-	Rp. 410.000,-	Rp. 1.574.000,-	Rp. 700.000,-
29.	SULAWESI TIN GAH	OP	Rp. 283.000,-	Rp. 389.000,-	Rp. 1.013.000,-	Rp. 672.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 237.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 587.000,-
31.	MALUKU	OP	Rp. 306.000,-	Rp. 454.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 760.000,-
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 316.000,-	Rp. 498.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 814.000,-
33.	PAPUA	OP	Rp. 318.000,-	Rp. 536.000,-	Rp. 1.863.000,-	Rp. 854.000,-
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 292.000,-	Rp. 526.000,-	Rp. 1.752.000,-	Rp. 818.000,-

Tabel 23  
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat  
Eselon II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp. 300.000,-	Rp. 330.000,-	Rp. 772.000,-	Rp. 630.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 178.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 746.000,-	Rp. 453.000,-
3.	RIAU	OP	Rp. 185.000,-	Rp. 245.000,-	Rp. 591.000,-	Rp. 430.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 227.000,-	Rp. 273.000,-	Rp. 625.000,-	Rp. 500.000,-
5.	JAMBI	OP	Rp. 215.000,-	Rp. 301.000,-	Rp. 840.000,-	Rp. 516.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 173.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 663.000,-	Rp. 413.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 218.000,-	Rp. 293.000,-	Rp. 745.000,-	Rp. 511.000,-
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 216.000,-	Rp. 270.000,-	Rp. 640.000,-	Rp. 486.000,-
9.	BENGKULU	OP	Rp. 214.000,-	Rp. 284.000,-	Rp. 912.000,-	Rp. 498.000,-
10.	BANG KA BELITUNG	OP	Rp. 299.000,-	Rp. 385.000,-	Rp. 804.000,-	Rp. 684.000,-
11.	BANTEN	OP	Rp. 275.000,-	Rp. 354.000,-	Rp. 837.000,-	Rp. 629.000,-
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 331.000,-	Rp. 398.000,-	Rp. 822.000,-	Rp. 729.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp. 354.000,-	Rp. 433.000,-	Rp. 1.197.000,-	Rp. 787.000,-
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 191.000,-	Rp. 263.000,-	Rp. 675.000,-	Rp. 454.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp. 210.000,-	Rp. 310.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 520.000,-
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 338.000,-	Rp. 395.000,-	Rp. 1.352.000,-	Rp. 733.000,-
17.	BALI	OP	Rp. 330.000,-	Rp. 441.000,-	Rp. 1.182.000,-	Rp. 771.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 280.000,-	Rp. 420.000,-	Rp. 764.000,-	Rp. 700.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 271.000,-	Rp. 377.000,-	Rp. 825.000,-	Rp. 648.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 250.000,-	Rp. 331.000,-	Rp. 664.000,-	Rp. 581.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 242.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 1.031.000,-	Rp. 582.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 194.000,-	Rp. 295.000,-	Rp. 734.000,-	Rp. 489.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 207.000,-	Rp. 302.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 509.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 207.000,-	Rp. 302.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 509 000,-
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 185.000,-	Rp. 270.000,-	Rp. 737.000,-	Rp. 455.000,-
26.	GORONTALO	OP	Rp. 175.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 1.299.000,-	Rp. 425.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 235.000,-	Rp. 323.000,-	Rp. 792.000,-	Rp. 558.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 206.000,-	Rp. 320.000,-	Rp. 1.127.000,-	Rp. 526.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 234.000,-	Rp. 385.000,-	Rp. 738.000,-	Rp. 619.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 195.000,-	Rp. 295.000,-	Rp. 688.000,-	Rp. 490.000,-
31.	MALUKU	OP	Rp. 253.000,-	Rp. 346.000,-	Rp. 724.000,-	Rp. 599.000,-
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 169.000,-	Rp. 354.000,-	Rp. 669.000,-	Rp. 523.000,-
33.	PAPUA	OP	Rp. 293.000,-	Rp. 478.000,-	Rp. 990.000,-	Rp. 771.000,-
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 284.000,-	Rp. 421.000,-	Rp. 1.120.000,-	Rp. 705.000,-

3.2. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 24  
Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
3.	RIAU	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 130.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
5.	JAMBI	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
9.	BENGKULU	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
11.	BANTEN	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 180.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 180.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
17.	BALI	OH	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 160.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
26.	GORONTALO	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
31.	MALUKU	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
33.	PAPUA	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 200.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 160.000,-

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kegiatan dinas pejabat, kendaraan oprasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel 25  
Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT ESELON II		
	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat eselon II - Kota Cilegon – Provinsi Banten	Unit	Rp. 462.063.000,-

Tabel 26

Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) KOTA CILEGON – PROVINSI BANTEN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PICK UP	Unit	Rp. 205.227.000,-
2.	MINIBUS	Unit	Rp. 327.114.000,-
3.	DOUBLE GARDAN	Unit	Rp. 463.170.000,-

Tabel 27

Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp. 360.942.000,-
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp. 718.252.000,-
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.184.787.000,-



Tabel 28

Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANTEN	Unit	Rp. 30.017.000,-	Rp. 36.360.000,-

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan Gedung dan bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin Gedung atau bangunan di dalam daerah, guna menjaga atau mempertahankan Gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan Gedung atau bangunan di dalam daerah yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan Gedung dan bangunan meliputi :

- pemeliharaan Gedung, atau bangunan bertingkat,
- pemeliharaan Gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan
- pemeliharaan halaman kantor

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam daerah dialokasikan untuk :

1. Gedung atau bangunan milik daerah, dan/atau
2. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewakan dan/atau dipinjam oleh penggunaan barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi penggunaan barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 29

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri		
1.	Gedung / Bertingkat	M2/Tahun	Rp. 202.000,-
2.	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	Rp. 144.000,-
3.	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp. 11.000,-
3.	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp. 10.000,-

d. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kebutuhan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

**Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar**, yang besarnya sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :
  1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris, dan/atau
  2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Tabel 30  
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/ Tahun	Rp. 41.900.000,-
II	ANGGOTA DPRD	Unit/ Tahun	Rp. 41.000.000,-
III	PEJABAT ESELON I	Unit/ Tahun	Rp. 40.000.000,-
IV	PEJABAT ESELON II Provinsi Banten – Kota Cilegon	Unit/ Tahun	Rp. 38.410.000,-

Catatan : Biaya pemeliharaan sebagaimana Tabel 30 sudah termasuk biaya BBM operasional kendaraan Dinas Pejabat dengan rincian, Tabel sebagai berikut :

Tabel 30.1  
Standar biaya BBM untuk Kendaraan Operasional Pejabat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Bulan	Rp. 1.750.000,-
2	WAKIL WALI KOTA / WAKIL KETUA DPRD	Unit/Bulan	Rp. 1.650.000,-
3	PEJABAT ESELON II A	Unit/Bulan	Rp. 1.500.000,-
4	PEJABAT ESELON II B	Unit/Bulan	Rp. 1.250.000,-

Tabel 31  
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	<i>DOUBLE GARDAN</i>	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BANTEN	Unit/ Tahun	Rp.33.410.000,-	Rp.36.090.000,-	Rp.3.580.000,-

catatan :

Biaya pemeliharaan sebagaimana Tabel 31 sudah termasuk biaya BBM operasional kendaraan Dinas Operasional dengan rincian, Tabel sebagai berikut:

Tabel 31.1  
Standar biaya BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kendaraan <i>Double Gardan</i>	Unit/Bulan	Rp. 1.650.000,-
2	Kendaraan Operasional PKK, Dharma Wanita, kendaraan oprasional mobil rescue, dan Protokol Prangkat Daerah	Unit/Bulan	Rp. 1.250.000,-
3	Kendaraan Ambulance, kendaraan oprasional patrol, kendaraan oprasional dapur umum lapanga, dan kendaraan oprasional LK3	Unit/Bulan	Rp. 1.000.000,-
4	Kendaraan Operasional Eselon III	Unit/Bulan	Rp. 950.000,-
5	Kendaraan Operasional Eselon IV.	Unit/Bulan	Rp. 700.000,-
6	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit/Bulan	Rp. 200.000,-

Tabel 32  
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan Speed Boat.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
2.	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	Rp. 37.110.000,-
3.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp. 20.240.000,-

Biaya pemeliharaan sebagaimana tabel 32 sudah termasuk biaya BBM. Dengan rincian, Tabel sebagai berikut :

Tabel 32.1  
Standar biaya BBM untuk Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan Speed Boat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bus	Unit/Bulan	Rp. 1.000.000,-

e. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang investasi kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC Split, dan genset dan/atau barang sarana kantor lainnya yang sejenis agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Catatan :

- Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Tabel 33  
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000,-
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp. 730.000,-
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp. 690.000,-
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp. 610.000,-
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,-
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000,-
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000,-
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,-
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,-
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000,-
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,-
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000,-
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000,-
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000,-
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000,-
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000,-
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000,-

6. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

2. Tabel 34

3. Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000,-
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000,-
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000,-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 34, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI YANG SIFATNYA DAPAT MELEBIHI STANDAR BIAYA

a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya yang pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Standar harga satuan regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 35

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp. 13.285.000,-	Rp. 7.081.000,-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp. 7.412.000,-	Rp. 3.797.000,-
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp. 7.519.000,-	Rp. 4.492.000,-
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp. 2.407.000,-	Rp. 1.583.000,-
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp. 5.252.000,-	Rp. 2.995.000,-
6.	JAKARTA	BATAM	Rp. 4.867.000,-	Rp. 2.888.000,-
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp. 4.364.000,-	Rp. 2.621.000,-
8.	JAKARTA	BIAK	Rp. 14.065.000,-	Rp. 7.519.000,-
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp. 5.305.000,-	Rp. 3.262.000,-
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp. 7.231.000,-	Rp. 4.824.000,-
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp. 4.065.000,-	Rp. 2.460.000,-
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp. 14.568.000,-	Rp. 8.193.000,-
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 4.107.000,-	Rp. 2.268.000,-
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp. 7.658.000,-	Rp. 4.182.000,-
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp. 9.413.000,-	Rp. 5.081.000,-
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp. 7.444.000,-	Rp. 3.829.000,-
17.	JAKARTA	MALANG	Rp. 4.599.000,-	Rp. 2.695.000,-
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp. 7.295.000,-	Rp. 4.867.000,-
19.	JAKARTA	MANADO	Rp. 10.824.000,-	Rp. 5.102.000,-
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp. 16.226.000,-	Rp. 10.824.000,-
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp. 5.316.000,-	Rp. 3.230.000,-
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp. 7.252.000,-	Rp. 3.808.000,-
23.	JAKARTA	PADANG	Rp. 5.530.000,-	Rp. 2.952.000,-
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp. 4.984.000,-	Rp. 2.984.000,-
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp. 3.861.000,-	Rp. 2.268.000,-
26.	JAKARTA	PALU	Rp. 9.348.000,-	Rp. 5.113.000,-
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp. 3.412.000,-	Rp. 2.139.000,-
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp. 5.583.000,-	Rp. 3.016.000,-
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp. 4.353.000,-	Rp. 2.781.000,-
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp. 3.861.000,-	Rp. 2.182.000,-
31.	JAKARTA	SOLO	Rp. 3.861.000,-	Rp. 2.342.000,-
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp. 5.466.000,-	Rp. 2.674.000,-
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp. 10.001.000,-	Rp. 6.664.000,-
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp. 13.830.000,-	Rp. 7.487.000,-

Catatan :

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara at cost).

b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- Keberangkatan
  - Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan.
  - Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
- Kepulangan
  - Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal,
  - Dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 36, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 36  
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp. 123.000,-
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp. 232.000,-
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp. 94.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp. 137.000,-
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp. 147.000,-
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 190 000,-
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 128.000,-
8.	LAMPUNG	Orang /Kali	Rp. 167.000,-
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp. 109.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp. 90.000,-
11	BANTEN	Orang/ Kali	Rp. 446.000,-
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 166.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp. 256.000,-
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 75.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp. 118.000,-
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 194.000,-
17.	BALI	Orang / Kali	Rp. 159.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 231.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 108.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp. 135.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 111.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 150.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 450.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp. 102.000,-
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp. 138.000,-
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp. 240.000,-
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp. 313.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	Orang /Kali	Rp. 145.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 165.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp. 171.000,-
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp. 240.000,-
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp. 215.000,-
33.	PAPUA	Orang /Kali	Rp. 431.000,-
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 182.000,-

Catatan :

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibu Kota Provinsi ke tempat tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

Tabel 37

satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one way*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp. 160.000,-



8. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT YANG SIFATNYA DAPAT MELEBIHI STANDAR BIAYA

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan, sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

- 1. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon 1, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon 1, atau pejabat yang setara, atau
- 2. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon 2 lainnya, eselon 1 lainnya, kementrian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tabel 38  
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO	PROVINSI / KOTA/KABUPATEN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Konsumsi Rapat			
a.	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon 1, atau setara	Orang/ Kali	Rp.110.000,-	Rp. 49.000,-
b.	Rapat biasa - Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp. 54.000,-	Rp. 19.000,-

Catatan :  
Biaya Konsumsi Rapat Poin a. dapat melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

9. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

9.1 Honorarium Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Harian Lepas

- a. Tenaga Kerja Kontrak diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota. Tenaga Harian Lepas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. dan dibayarkan besaran honorarium per bulan berdasarkan klaster Satuan Perangkat Daerah. Honorarium diberikan kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang melaksanakan tugas dan fungsi. sebagai :

- 1. Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
- 2. Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 3. Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 4. Tenaga Arsip dan Perpustakaan
- 5. Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

6. Tenaga Administrasi
7. Tenaga Pelayanan Umum
8. Tenaga Supir
9. Tenaga Operator Komputer
10. Tenaga Penanganan Bencana
11. Tenaga Penanganan Sosial
12. Tenaga Perhubungan
13. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

Tabel 39  
Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - TKK SLTA Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - TKK D3 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - TKK S1 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK S1 Kluster 2-B	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK D3 Kluster 2-B	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK SLTA Kluster 2-B	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK S1 Kluster 1-B	Satuan Polisi Pamong Praja	Orang / Bulan	3.850.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK D3 Kluster 1-B	Satuan Polisi Pamong Praja	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK SLTA Kluster 1-B	Satuan Polisi Pamong Praja	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - TKK S1 Kluster 1-B	Dinas Pemadam Kebakaran	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - TKK D3 Kluster 1-B	Dinas Pemadam Kebakaran	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - TKK SLTA Kluster 1-B	Dinas Pemadam Kebakaran	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - TKK SLTA Kluster 2-B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - TKK D3 Kluster 2-B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - TKK S1 Kluster 2-B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - TKK SLTA Kluster 2-B	Dinas Sosial	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - TKK D3 Kluster 2-B	Dinas Sosial	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - TKK S1 Kluster 2-B	Dinas Sosial	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Perhubungan - TKK D3 Kluster 1-B	Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Perhubungan - TKK SLTA Kluster 1-B	Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Perhubungan - TKK S1 Kluster 1-B	Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.850.000

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - TKK SLTA 2-A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Orang / Bulan	3.300.000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - TKK D3 2-A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Orang / Bulan	3.465.000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - TKK S1 2-A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Orang / Bulan	3.630.000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - TKK S1 2-B	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - TKK SLTA 2-B	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - TKK D3 2-B	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - TKK SLTA 2-B	Disparbud	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - TKK D3 2-B	Disparbud	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - TKK S1 2-B	Disparbud	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	3.300.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	2.970.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.410.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.080.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.630.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.465.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.300.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.520.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK D3 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK D3 Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK SLTA Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK D3 Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK SLTA Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK D3 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Orang / Bulan	3.850.000

<b>URAIAN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK SLTA Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK S1 Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP,	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK SLTA Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.300.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.465.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK S1 Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.630.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK SLTA Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK S1 Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK SLTA Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.080.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK S1 Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.410.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK SLTA Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	2.970.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK S1 Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	3.300.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.850.000



URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.300.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.465.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.630.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.080.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	3.410.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	2.970.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	3.300.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.465.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-A	Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.520.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.685.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.300.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Tenaga Supir - TKK S1 Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.630.000
Honorarium Tenaga Supir - TKK SLTA Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Supir - TKK D3 Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Supir - TKK S1 Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	3.520.000

b. Honorarium diberikan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) yang melaksanakan tugas dan fungsi. sebagai :

1. Tenaga Arsip dan Perpustakaan
2. Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
3. Tenaga Administrasi
4. Tenaga Pelayanan Umum
5. Tenaga Supir
6. Tenaga Operator Komputer
7. Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
8. Tenaga Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat
9. Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10. Tenaga Penanganan Bencana
11. Tenaga Penanganan Sosial

- 12. Tenaga Perhubungan
- 13. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
- 14. Tenaga Pendidikan
- 15. Tenaga Kesehatan
- 16. Tenaga Laboratorium
- 17. Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

Tabel 40

Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
Honorarium Tenaga Pendidikan-THL Kluster 2-A	Dinas Pendidikan	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Kesehatan - THL Kluster 2-A	Dinas Kesehatan, RSUD	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Laboratorium - THL Kluster 2-A	Dinas Kesehatan, RSUD	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - THL Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - THL Kluster 2-B	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - THL Kluster 1-B	Satuan Polisi Pamong Praja	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - THL Kluster 1-B	Dinas Pemadam Kebakaran	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - THL Kluster 2-B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - THL Kluster 2-B	Dinas Sosial	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Perhubungan - THL Kluster 1-B	Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - THL Kluster 2-A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - THL Kluster 2-B	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - THL Kluster 2-B	Disparbud	Orang / Bulan	2.860.000

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	2.475.000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 1-B	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS)	Orang / Bulan	3.190.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.135.000

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	2.475.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 3-A	Kecamatan dan Kelurahan	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	2.475.000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 3-B	SMP Negeri	Orang / Bulan	2.365.000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 3-A	Kecamatan	Orang / Bulan	2.750.000

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	Orang / Bulan	3.245.000
Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 2-A	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 2-B	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	Orang / Bulan	2.860.000
Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 1-C	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKPAD, DPMPTSP	Orang / Bulan	3.135.000
Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 1-B	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran,	Orang / Bulan	3.245.000

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan		

9.2 Jasa Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan

Tabel 41

Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan lain-lainnya

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP.)
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 1-A	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Kebersihan -Kluster 1-B	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 1-A (Pasukan Kuning)	Orang / Bulan	3.355.000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 1-C	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 2-A	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 2-B	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 3-A	Orang / Bulan	2.585.000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 3-B	Orang / Bulan	2.365.000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 3-A	Orang / Bulan	2.585.000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 1-B	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 1-C	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 2-A	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 2-B	Orang / Bulan	2.750.000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 3-B	Orang / Bulan	2.365.000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 1-A	Orang / Bulan	2.750.000

9.3 Jasa Tenaga Keamanan Pasar dan Tenaga Kebersihan Pasar diberikan berdasarkan pada tempat kerja dan kondisi kerja pada lingkungan Pasar, Tenaga Keamanan Patwal, dan Tenaga Kemanan Sekolah.

Honorarium yang diberikan kepada petugas Keamanan Pasar dan Petugas Kebersihan pasar di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Cilegon.

Tabel 42

Tenaga Keamanan Pasar, Tenaga Keamanan Patwal, Tenaga Keamanan Sekolah, Penjaga Palang pintu kereta api dan Tenaga Kebersihan Pasar

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Keamanan Pasar	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Kebersihan Pasar	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Penjaga Palang Pintu Jalur Kereta Api	Orang / Bulan	3.850.000
Honorarium Tenaga Keamanan Petugas Patwal Polisi	Orang	1.000.000
Pengamanan Dan Pengawalan Pribadi KDH (Unsur Kepolisian)	Orang / Bulan	4.400.000



Honorarium Petugas Keamanan Sekolah (Non PNS TK Negeri dan Satap)	Orang / Bulan	600.000
---	---------------	---------

9.4 Honorarium Gaji 13 dan Gaji 14

Honorarium Tunjangan Pendidikan (Gaji 13) dan Tunjangan Hari Raya (Gaji 14) diberikan kepada Pegawai Non ASN (TKK, dan THL) yang bekerja di lingkungan Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9.5 Uang Lembur

Uang lembur diberikan dengan ketentuan :

- a. ASN, Non ASN dan instansi vertikal yang meliputi Tenaga Medis/ Dokter Paramedis/ Perawat, dan non medis yang melaksanakan tugas dalam rangka Pengaturan, Pengamanan dan Medis pada hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru, pengamanan medis pada kegiatan yang bersifat insidentil diluar jam kerja.
- b. ASN/Non ASN petugas pengawalan Pejabat Negara/ Pejabat Daerah diluar jam kerja.
- c. ASN dan Non ASN sebagaimana point 1 dan 2 didasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan wajib membuat laporan hasil lembur.

9.6 Honorarium Tenaga Instruktur, Fasilitator, Tenaga Pengisi Acara dan Sambutan

Tabel 44

Honorarium Tenaga Instruktur, Fasilitator, Tenaga Pengisi Acara dan Sambutan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tenaga Pengisi Acara dan Sambutan	Pengisi Acara Sambutan	Orang / Kegiatan	1.000.000
2	Tenaga Pengisi Acara dan Sambutan	Penerima Tamu	Orang / Kegiatan	300.000
3	Tenaga Instruktur	Instruktur Senam	Orang / Kegiatan	250.000
4	Fasilitator Musrenbang	Fasilitator Kelurahan/ Kecamatan	Orang / Kegiatan	500.000
5	Honorarium Instruktur	Instruktur PAPEP Kerajinan dan Keterampilan, Tata Boga, Tata Rias, dan Menjahit	Orang / Jam Pelajaran	200.000

#### 9.7 Satuan Biaya Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Satuan biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung dialokasikan untuk pekerjaan penyusunan perumusan/perancangan suatu kebijakan yang pelaksanaannya dengan metode swakelola dan/atau kerja sama dengan yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan.

Satuan biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk **Non Konstruksi** ditetapkan sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (*Billing Rate*) dan Biaya langsung ( *Direct Cost* ) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023.

Satuan biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk **Konstruksi** ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi.

a. Biaya Personel (billing rate);

Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya tidak langsung (overhead cost). dan keuntungan (profit/fee).

Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memperhatikan ketentuan pedoman standar minimal biaya langsung personil dan non personil kegiatan usaha jasa konsultansi yang diterbitkan oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi.

b. Biaya langsung non personel (Direct Cost).

Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum. Harga Satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost).

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya pengumpulan data sekunder, Seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, Diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost) diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya. kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi Nonkonstruksi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, penyelidikan tanah dan lain-lain.

Tabel 45

Satuan Biaya Tenaga Ahli Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional (Professional) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB)

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional (Professional) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparable Experiences).

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	(**	64.450.000	67.950.000
2	(**	71.900.000	74.750.000
3	50.850.000	78.300.000	81.550.000
4	57.200.000	84.700.000	88.350.000
5	63.600.000	91.100.000	95.150.000
6	70.000.000	97.550.000	101.950.000
7	76.400.000	103.950.000	108.750.000
8	82.800.000	110.350.000	115.550.000
9	89.200.000	116.800.000	122.350.000
10	95.600.000	123.200.000	129.100.000
11	102.000.000	129.600.000	135.900.000
12	108.400.000	136.000.000	142.700.000
13	114.800.000	142.450.000	149.500.000
14	121.200.000	148.850.000	156.300.000

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
15	127.550.000	155.250.000	163.100.000
16	133.950.000	161.650.000	169.900.000
17	140.350.000	168.100.000	176.700.000
18	146.750.000	174.500.000	183.500.000
19	153.150.000	180.900.000	190.300.000
20	159.550.000	187.350.000	197.050.000
21	165.950.000	193.750.000	203.850.000
22	172.350.000	200.150.000	210.650.000
23	178.750.000	206.550.000	217.450.000
24	185.150.000	213.000.000	224.250.000
25	191.550.000	219.400.000	231.050.000

*Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung ( Direct Cost ) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023*

Tabel 46

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) Tahun 2023 untuk Tenaga Ahli Nasional (Professional) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) Tahun 2023 untuk Tenaga Ahli Nasional (Professional) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (Comparable Experiences)

Kualifikasi Tenaga Ahli dengan SKK/SKA	Tahun			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
Ahli Muda			1	21.972.250	28.953.250	36.963.500
			2	23.359.500	30.653.750	38.753.500
Ahli Madya		1	3	24.746.750	32.309.500	40.543.500
		2	4	26.089.250	34.010.000	42.333.500
		3	5	27.476.500	35.710.500	44.123.500
Ahli Utama	1	4	6	28.863.750	37.411.000	45.913.500
	2	5	7	30.251.000	39.111.500	47.703.500
	3	6	8	31.638.250	40.812.000	49.493.500
	4	7	9	32.980.750	42.512.500	51.283.500
	5	8	10	34.368.000	44.213.000	53.073.500
	6	9	11	35.755.250	45.913.500	54.818.750
	7	10	12	37.142.500	47.614.000	56.608.750
	8	11	13	38.529.750	49.314.500	58.398.750
	9	12	14	39.872.250	51.015.000	60.188.750
	10	13	15	41.259.500	52.670.750	61.978.750
	11	14	16	42.646.750	54.371.250	63.768.750
	12	15	17	44.034.000	56.071.750	65.558.750
	13	16	18	45.421.250	57.772.250	67.348.750
	14	17	19	46.808.500	59.472.750	69.138.750
	15	18	20	48.151.000	61.173.250	70.928.750
	16	19	21	49.538.250	62.873.750	72.718.750
	17	20	22	50.925.500	64.574.250	74.464.000
	18	21	23	52.312.750	66.274.750	76.254.000

Kualifikasi Tenaga Ahli dengan SKK/SKA	Tahun			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
	19	22	24	53.700.000	67.975.250	78.044.000
	20	23	25	55.042.500	69.675.750	79.834.000

*Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung ( Direct Cost ) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Banten 0.895.*

Tabel 47

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional  
(Professional) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK/SKA

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional  
(Professional) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK/SKA dalam rangka  
Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang  
setara Comparable Experiences)

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1		25.552.250	33.383.500
2		27.252.750	35.173.500
3	21.972.250	28.953.250	36.963.500
4	23.359.500	30.653.750	38.753.500
5	24.746.750	32.309.500	40.543.500
6	26.089.250	34.010.000	42.333.500
7	27.476.500	35.710.500	44.123.500
8	28.863.750	37.411.000	45.913.500
9	30.251.000	39.111.500	47.703.500
10	31.638.250	40.812.000	49.493.500
11	32.980.750	42.512.500	51.283.500
12	34.368.000	44.213.000	53.073.500
13	35.755.250	45.913.500	54.818.750
14	37.142.500	47.614.000	56.608.750
15	38.529.750	49.314.500	58.398.750
16	39.872.250	51.015.000	60.188.750
17	41.259.500	52.670.750	61.978.750
18	42.646.750	54.371.250	63.768.750
19	44.034.000	56.071.750	65.558.750
20	45.421.250	57.772.250	67.348.750
21	46.808.500	59.472.750	69.138.750
22	48.151.000	61.173.250	70.928.750
23	49.538.250	62.873.750	72.718.750
24	50.925.500	64.574.250	74.464.000
25	52.312.750	66.274.750	76.254.000

*Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung ( Direct Cost ) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Banten 0.895.*

Tabel 48

Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Asing  
Pada Jenjang Jabatan Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional  
Atau Seleksi Internasional

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	88.432.500	151.242.250	160.312.250
2	104.531.750	167.114.750	177.318.500
3	120.631.000	183.214.000	194.324.750
4	136.503.500	199.313.250	211.331.000
5	152.602.750	215.412.500	228.337.250
6	168.702.000	231.511.750	245.570.250
7	184.801.250	247.611.000	262.576.500
8	200.673.750	263.710.250	279.582.750
9	216.773.000	189.109.500	296.589.000
10	232.872.250	295.908.750	313.595.250
11	248.971.500	312.008.000	330.601.500
12	264.844.000	328.107.250	347.834.500
13	280.943.250	344.206.500	364.840.750
14	297.042.500	360.305.750	381.847.000
15	313.141.750	376.405.000	398.853.250
16	329.014.250	392.277.500	415.859.500
17	345.113.500	408.376.750	432.865.750
18	361.212.750	424.476.000	449.872.000
19	377.085.250	440.575.250	467.105.000
20	393.184.500	456.674.500	484.111.250
21	409.283.750	472.773.750	501.117.500
22	425.383.000	488.873.000	518.123.750
23	441.255.500	504.972.250	535.130.000
24	457.354.750	521.071.500	552.136.250
25	473.454.000	537.170.750	569.369.250

*Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi*

Tabel 49

Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi  
Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	30.838.000	52.832.750	56.007.250
2	36.506.750	58.501.500	61.902.750
3	42.175.500	64.170.250	68.025.000
4	47.844.250	69.612.250	73.920.500
5	53.286.250	75.281.000	79.816.000
6	58.955.000	80.949.750	85.938.250
7	64.623.750	86.618.500	91.833.750
8	70.292.500	92.287.250	97.729.250

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
9	75.734.500	97.956.000	103.851.500
10	81.403.250	103.398.000	109.747.000
11	87.072.000	109.066.750	115.642.500
12	92.740.750	114.735.500	121.538.000
13	98.182.750	120.404.250	127.660.250
14	103.851.500	126.073.000	133.555.750
15	109.520.250	131.741.750	139.451.250
16	115.189.000	137.183.750	145.573.500
17	120.631.000	142.852.500	151.469.000
18	126.299.750	148.521.250	157.364.500
19	131.968.500	154.190.000	163.486.750
20	137.637.250	159.858.750	169.382.250
21	143.079.250	165.300.750	175.277.750
22	148.748.000	170.969.500	181.173.250
23	154.416.750	176.638.250	187.295.500
24	159.858.750	182.307.000	193.191.000
25	165.527.500	187.975.750	199.086.500

*Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi*

Tabel 50

Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional

Kualifikasi Tenaga Ahli	Tahun			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
Ahli Muda			1	17.686.500	24.035.500	31.064.750
			2	19.047.000	25.622.750	32.878.750
Ahli Madya		1	3	20.634.250	27.436.750	34.692.750
		2	4	21.994.750	29.250.750	36.506.750
		3	5	23.355.250	30.838.000	38.320.750
Ahli Utama	1	4	6	24.715.750	32.652.000	40.134.750
	2	5	7	26.076.250	33.785.750	41.948.750
	3	6	8	27.436.750	36.053.250	43.762.750
	4	7	9	29.024.000	37.640.500	45.576.750
	5	8	10	30.384.500	39.454.500	47.390.750
	6	9	11	31.745.000	41.268.500	49.204.750
	7	10	12	33.105.500	42.855.750	51.018.750
	8	11	13	34.466.000	44.669.750	52.832.750
	9	12	14	35.826.500	46.257.000	54.646.750
	10	13	15	37.413.750	48.071.000	56.460.750
	11	14	16	38.774.250	49.885.000	58.274.750
	12	15	17	40.134.750	51.472.250	60.088.750
	13	16	18	41.495.250	53.286.250	61.902.750
	14	17	19	42.855.750	54.873.500	63.716.750

Kualifikasi Tenaga Ahli	Tahun			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
	15	18	20	44.216.250	56.687.500	65.530.750
	16	19	21	45.803.500	58.274.750	67.344.750
	17	20	22	47.164.000	60.088.750	69.158.750
	18	21	23	48.524.500	61.902.750	70.972.750
	19	22	24	49.885.000	63.490.000	72.786.750
	20	23	25	51.245.500	65.304.000	74.600.750

Tabel 51  
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE) UNTUK  
TENAGA AHLI SUB PROFESSIONAL

No	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (Rupiah / Bulan)
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	13.111.750
2	OPERATOR CAD/CAM	10.963.750
3	OPERATOR SIG	10.963.750
4	PEMROGRAMAN PERANGKAT LUNAK	13.111.750
5	PEMROGRAMAN BASIS DATA	13.111.750
6	OPERATOR BASIS DATA	12.709.000
7	PEMELIHARA SISTEM	12.709.000
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	12.709.000
9	ADMINISTRATOR WEB	12.709.000
10	DESAIN GRAFIS	13.111.750
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	10.963.750
12	FASILITATOR	10.963.750
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	12.709.000
14	TEKNISI	10.963.750
15	INSPEKTUR	10.963.750
16	SURVEYOR	10.337.250

Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung ( Direct Cost) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Banten 0.895.

Tabel 52  
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE)  
TENAGA PENDUKUNG (SUPPORTING STAFF)

No	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (Rupiah / Bulan)
1	MANAJER KANTOR	10.963.750
2	MANAJER KANTOR LAPANGAN/ADMINISTRATOR	9.979.250
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	10.874.250
4	SEKRETARIS	6.981.000
5	OPERATOR KOMPUTER	6.265.000
6	PENGEMUDI	4.922.500



No	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (Rupiah / Bulan)
7	KURIR	4.385.500
8	SATPAM	4.385.500
9	PESURUH KANTOR	4.206.500

*Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung ( Direct Cost ) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Banten 0.895.*

## 9.8 Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan

Tabel 54.1

### Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	Media Elektronik; Multimedia; Jasa Buzzer (Penggiat Sosial Media)	Kegiatan	4.000.000
2	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	Media Elektronik : Program TV - Talkshow Taping (18.30-22.00 WIB)	Per Tayang	20.000.000
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	Lens Event	Kegiatan	11.000.000
4	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	Parade Foto	Per Tayang	8.000.000
5	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	Rubrik Cilegon Baru. Modern dan Bermartabat	Per Tayang	15.000.000
6	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	Rubrik Cilegon City	Per Tayang	11.000.000
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	Potret Cilegon Membangun	Per Tayang	11.000.000
8	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan - Lensa Event BW	1/2 Halaman Hitam Putih	Per Tayang	5.550.000
9	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan - Lensa Event FC	1/2 Halaman Full Colour	Per Tayang	11.100.000
10	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan - Rubrik Khusus Cilegon	1 Halaman Bw	Per Tayang	16.650.000
11	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan - Advetorial	1/2 Halaman Full Colour	Per Tayang	22.200.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Advetorial	1 Halaman Full Colour	Per Tayang	44.400.000
13	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Iklan Display	1 Halaman Bw	Per Tayang	33.300.000
14	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Iklan Display	1/2 Halaman Fc	Per Tayang	22.200.000
15	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Iklan Display	1/4 Halaman Fc	Per Tayang	9.990.000
16	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Podcast	1 X Tayang 20-40 Menit	Per Tayang	11.100.000
17	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Online	Advertorial / Grafis	Per Tayang	1.665.000
18	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Advetorial	1/4 Halaman Full Colour	Per Tayang	15.000.000
19	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Potret Pembangunan	7 X 200 Mmk. BW	Per Tayang	11.000.000
20	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Belanja Pemberitaan Pariwara Media Elektronik	Per Tayang	1.000.000
21	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Belanja Pemberitaan Cetak	Per Tayang	750.000
22	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Bewlanja OnlineBelanja Pemberitaan Online	Per Tayang	500.000
23	Pariwara Radio	Pariwara Radio	Per Tayang	200.000
24	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Publikasi Media TV Nasional; Durasi 1 - 3 Menit	Per Tayang	30.000.000
25	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Publikasi Media TV Lokal; Durasi 1 - 3 Menit	Per Tayang	12.000.000
26	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Media Online Top Site News - Advertorial Media Online	Per Tayang	3.500.000
27	Jasa Iklan /Reklame, Film, dan Pemotretan	Penggiat Social Media	Orang / Bulan	1.500.000
28	Iklan Layanan Masyarakat/Publikasi di TV Nasional	Jasa surat kabar/majalah - jasa publikasi iklan layanan	Per Tayang	31.245.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		masyarakat di TV Nasioanl		
29	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - Belanja Pemberitaan	Iklan Media Online	Per Tayang	1.500.000
30	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemrotretan	- Belanja Pemberitaan Cetak	MMKolom	45.033

## 9.9 Beban Tagihan Telepon, Air, dan Listrik

Tabel 54.2

### Beban Instalasi Pasang Baru Listrik, Pasang Baru Internet

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 450 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	584.916
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 900 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	1.159.831
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 1300 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	1.670.867
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 2200 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	2.820.698
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 3500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	4.481.565
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 4400 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	5.631.396
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 5500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	7.036.745
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 6600 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	8.442.094
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 7700 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	9.847.443
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 10600 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	13.552.454
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 11000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	14.063.490

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 13200 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	16.874.188
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 16500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	21.090.235
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 23000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	29.394.470
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 33000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	42.170.470
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 41500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	53.029.985
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 53000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	67.722.270
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 66000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	84.330.940
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 82500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	105.411.175
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 105000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	134.156.950
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 131000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	167.374.290
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 147000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	187.815.730
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 164000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	209.534.760
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya 197000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	251.695.230
Instalasi Pasang Baru Listrik	Daya lebih dari 210.000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Kegiatan	268.303.900
Pemasangan Baru	Instalasi Pasang Baru Air Bersih	Kegiatan	3.500.000
Pemasangan Baru	Instalasi Pasang Baru Internet	Kegiatan	3.000.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Insatalasi Pasang Baru	- Insatalasi Pasang Baru Internet	Kegiatan	400.0000
Beban Penambahan Daya	Penambahan Daya Listrik	VA	2.400

Tabel 54.3

Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Internet Fiber Optik Domestik Dedicated	300 Mbps FO Domestik Dadicated	Bulan	35.200.000
2	Biaya Internet Fiber Optik Domestik Dedicated	200 Mbps FO Domestik Dadicated	Bulan	23.100.000
3	Biaya Internet Wireless Domestik Dedicated	100 Mbps Wireless Domestik Dadicated	Bulan	11.000.000
4	Biaya Internet Wireless Domestik Dedicated	50 Mbps Wireless Domestik Dadicated	Bulan	6.600.000
5	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Up To 10Mbps -	Bulan	470.000
6	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Up To 20Mbps -	Bulan	515.000
7	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Up To 50Mbps -	Bulan	825.000
8	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Up To 100Mbps -	Bulan	1.250.000
9	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Up To 200Mbps -	Bulan	2.000.000
10	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Up To 300Mbps -	Bulan	3.000.000
11	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Fiber Optik International 10 Mbps Dedicated	Bulan	11.740.000
12	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Fiber Optik International 30 Mbps Dedicated	Bulan	23.000.000
13	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Fiber Optik International 50 Mbps Dedicated	Bulan	36.540.000
14	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Fiber Optik International 60 Mbps Dedicated	Bulan	42.485.625
15	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Fiber Optik International	Bulan	46.010.580

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		200 Mbps Dedicated		
16	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Fiber Optik Domestik 20 Mbps Dedicated	Bulan	3.650.000
17	Beban TV Berlangganan		Unit / Bulan	300.000
18	Hosting	Hosting WEB	Tahun	3.480.000
19	Biaya Komunikasi Pelayanan Mobile	Dibatasi hanya untuk Nomor Khusus yang digunakan untuk Pelayanan Publik kepada Masyarakat dan Layanan Pemerintahan	Bulan	100.000
20	Belanja Tagihan Internet	Biaya Internet Up To 10Mbps	Bulan	350.000
21	Pemasangan Internet	Instalasi Pasang Baru	Kegiatan	400.000
22	Beban Tagihan Listrik	R-1/TR - Rumah Tangga Kecil Tegangan Rendah	Kwh	1.487
23	Beban Tagihan Listrik	R-1/TR - Rumah Tangga Kecil Tegangan Rendah	Kwh	1.589
24	Beban Tagihan Listrik	R-1/TR - Rumah Tangga Kecil Tegangan Rendah	Kwh	1.589
25	Beban Tagihan Listrik	R-2/TR - Rumah Tangga Menengah Tegangan Rendah	Kwh	1.869
26	Beban Tagihan Listrik	R-3/TR - Rumah Tangga Besar Tegangan Rendah	Kwh	1.869
27	Beban Tagihan Listrik	B-2/TR - Bisnis Menengah Tegangan Rendah	Kwh	1.589
28	Beban Tagihan Listrik	B-3/TM - Bisnis Besar Tegangan Menengah	Kwh	1.226
29	Beban Tagihan Listrik	I-3/TM - Industri Menengah Tegangan Menengah	Kwh	1.226
30	Beban Tagihan Listrik	I-4/TT - Industri Besar Tegangan Tinggi	Kwh	1.096
31	Beban Tagihan Listrik	P-1/TR - Kantor Pemerintahan Sedang Tegangan Rendah	Kwh	1.869

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Beban Tagihan Listrik	P-2/TM - Kantor Pemerintahan Besar Tegangan Menengah	Kwh	1.675
33	Beban Tagihan Listrik	P-3/TR - Penerangan Jalan Umum Tegangan Rendah	Kwh	1.869
34	Beban Tagihan Listrik	L/TR, TM, TT - Layanan Khusus	Kwh	1.869

9.10 Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah

Tabel 54.4  
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar /Majalah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar /Majalah	Koran Lokal I	Eksemplar	5.000
2	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar /Majalah	Koran Lokal II	Eksemplar	6.000
3	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar /Majalah	Koran Lokal III	Eksemplar	7.500
4	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar /Majalah	Koran Nasional	Eksemplar	10.000

9.11 Beban Jasa Jalan/Tol

Tabel 54.5  
Beban Jasa Jalan/Tol

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beban Jasa Jalan/Tol	Beban Jasa Jalan/Tol - Tarif Derek Kendaraan Dinas/Operasional dan Ambulan (5 KM pertama)	Km	135.000
2	Beban Jasa Jalan/Tol	Beban Jasa Jalan/Tol - Tarif Derek Kendaraan Dinas/Operasional dan Ambulan (Setelah 5 KM)	Km	10.000
3	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Merak - Cikupa; Termasuk Tarif Integrasi)	Kegiatan	61.500
4	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Cilegon Barat - Cikupa; Termasuk Tarif Integrasi)	Kegiatan	59.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Cilegon Timur - Cikupa; Termasuk Tarif Integrasi)	Kegiatan	52.500
6	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Merak - Serang Barat)	Kegiatan	17.000
7	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Cilegon Barat - Serang Barat)	Kegiatan	14.000
8	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Cilegon Timur - Serang Timur)	Kegiatan	12.000
9	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Cilegon Barat - Serang Timur)	Kegiatan	18.500
10	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Merak - Serang Timur)	Kegiatan	21.500
11	Jasa Tol	Jalan Tol Tangerang - Merak (GT. Cilegon Timur - Serang Barat)	Kegiatan	8.000

9.12 Jasa Penyelenggaraan Acara

Tabel 54.6

Beban Jasa Penyelenggaraan Acara

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara			
1	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Inspektur Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
2	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Perwira Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
3	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Cadangan Perwira Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
4	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Komandan Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000



No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Cadangan Komandan Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
6	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Komandan Pasukan	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
7	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Komandan Kompi Pasukan	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
8	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Kompi Paskibra	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
9	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pam Inspektur Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
10	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Penanggung Jawab Pawai	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
11	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pengatur Barisan	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
12	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pembaca Teks / Naskah	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	400.000
13	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pembawa Pataka / Obor	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	400.000
14	Honorarium Petugas Upacara Peringatan	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Hari Besar - Pembawa Acara / MC			
15	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pembaca Doa	Unsur Tokoh Ulama / MUI / Kemenag	Orang / Kegiatan	500.000
16	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Operator Lainnya	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
17	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Juri dan Komentator	Unsur yang Menguasai Bidangnya	Orang / Kegiatan	1.000.000
18	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Marching Band / Koorsk Pendukung	Unsur PDBI Kota Cilegon	Orang / Kegiatan	150.000
19	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Paduan Suara	Unsur Sipil / Pelajar	Orang / Kegiatan	150.000
20	Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Paskibra	Unsur PPI	Orang / Kegiatan	150.000
21	Jasa Penyelenggaraan Acara	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi CASN	Orang / Kegiatan	450.000
22	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembina Peserta MTQ	Orang	1.700.000
23	Jasa Penyelenggaraan Acara	Koordinator Pawai Ta'aruf	Orang	500.000
24	Jasa Penyelenggaraan Acara	Seksi Musabaqoh	Orang	750.000
25	Jasa Penyelenggaraan Acara	Penerima Tamu	Orang	300.000
26	Jasa Penyelenggaraan Acara	Tenaga Penyusun Sambutan / Pidato	Orang	300.000
27	Jasa Penyelenggaraan Acara	Official MTQ Provinsi	Orang	1.200.000
28	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pendamping Qori / Qoriah	Orang	600.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Jasa Penyelenggaraan Acara	Peserta MTQ	Orang	2.500.000
30	Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Sekretariat MTQ Provinsi	Orang	1.200.000
31	Jasa Penyelenggaraan Acara	Seksi Musabaqoh STQ	Orang / Hari	100.000
32	Tenaga Pengisi Acara	MC	Orang	3.000.000
33	Tenaga Pengisi Acara	Tarian Pembukaan	Group	3.000.000
34	Tenaga Pengisi Acara	Personil Band & Singer	Group	6.000.000
35	Jasa Penyelenggaraan Acara	Event Organizer Kegiatan AKKOPSI	Kegiatan	600.000.000
36	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Tarian Pembukaan	Group	3.000.000
37	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Paduan Suara	Orang / Kegiatan	100.000
38	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dirigen	Orang / Kegiatan	300.000
39	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pianis	Orang / Kegiatan	250.000
40	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Narasumber / Pengajar Baik Teori dan Praktek yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang	Orang / Jam	500.000
41	Honorarium Narasumber atau Pembahas	MOT, QC, TOC yang Ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang	Orang / Hari	300.000
42	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Narasumber / Pengajar / Fasilitator yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang	Orang / Jam	300.000

9.13 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian.
2. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
  - b) Pakaian Dinas Upacara (PDU) dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
  - c) Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.
3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai : Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

Tabel 54.7

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1.300.000
2	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)		
a.	Pakaian Dinas Dokter	Stel	1.122.000
b.	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat - PSC 119 Formal Standar kemenkes	Stel	360.000
c.	Seragam Linmas SATPOL-PP		1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
d.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Hitam Putih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	3.000.000
e.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	3.000.000
f.	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat	Stel	762.000
3	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		
a.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	3.000.000
b.	Pakaian Dinas Pegawai	Stel	838.200
4	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)		
a.	Pakaian Sipil Resmi : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	3.000.000
b.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) : Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	1.300.000
5	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)		
a.	Pakaian Dinas Upacara	Stel	1.524.000
b.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	7.000.000
6	Beban Pakaian Adat Daerah		
a.	Pakaian Kostum Etnic Kebudayaan Icon Spesifikasi Premium	Stel	13.000.000
b.	Pakaian Kostum Etnic Kebudayaan Icon Spesifikasi Medium	Stel	9.500.000
c.	Pakaian Kostum Etnic Kebudayaan Icon Spesifikasi Standar	Stel	7.500.000
d.	Pakaian Adat Daerah : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	2.000.000
e.	Pakaian Adat Etnic Carnival : Etnic Carnival	Stel	8.500.000
7	Beban Pakaian Batik Tradisional		
a.	Pakaian Batik Tradisional : Lengan panjang/ pendek	Stel	400.000
b.	Pakaian Batik Korpri : Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah	Stel	2.000.000
c.	Pakaian Batik Tradisional : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Pasangan	Stel	3.500.000
8	Beban Pakaian Olahraga		
	Pakaian Olahraga : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	3.500.000

9.14 Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan  
Serta Alat Rumah Tangga

Tabel 54.8  
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta  
Alat Rumah Tangga

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jasa Pencucian	Laundry	Kg	20.000

9.15 Beban Honorarium Rohaniawan Lainnya

Tabel 54.9  
Beban Honorarium Rohaniawan Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Rohaniawan	Pengambilan Sumpah Jabatan dan Acara Pelantikan	Orang / Kegiatan	400.000
2	Tenaga Pengisi Acara dan Sambutan	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	Orang / Kegiatan	500.000
3	Tenaga Pengisi Acara dan Sambutan	Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	500.000
4	Honorarium Rohaniawan	Pembaca Syimaan Qiroatul Kutub	Orang	500.000
5	Honorarium Rohaniawan	Pezikir Istighosah	Orang	500.000
6	Honorarium Rohaniawan	Penceramah Lokal	Orang	5.000.000
7	Honorarium Rohaniawan	Penceramah Nasional	Orang	25.000.000
8	Honorarium Rohaniawan	Penceramah Tarjung	Orang	1.000.000
9	Honorarium Rohaniawan	Imam Shalat Tarjung	Orang	750.000
10	Honorarium Rohaniawan	Rohaniawan (UPTD PPA)	Orang/ Bulan	2.000.000
11	Honorarium Rohaniawan	Petugas Bilal	Orang	500.000

9.16 Beban Paket Pengiriman

Tabel 54.10  
Jasa Paket / Pengiriman

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengiriman Berkas	Jasa Pengiriman Berkas	Kali	20.000

9.17 Beban Registrasi / Keanggotaan

Tabel 54.11

Beban Registrasi/Keanggotaan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beban Registrasi/Keanggotaan Sarana Prasarana Olahraga	Minisoccer	Jam	800.000
2	Beban Registrasi/Keanggotaan Sarana Prasarana Olahraga	Futsal	Jam	200.000
3	Beban Registrasi/Keanggotaan Sarana Prasarana Olahraga	Badminton	Jam	75.000

9.18 Belanja Jasa Kalibrasi

Tabel 54.12

Belanja Jasa Kalibrasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Spectro Photo Meter	Unit	800.000
2	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi PH Meter	Unit	950.000
3	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Turbidimeter	Unit	875.000
4	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Microscope	Unit	500.000
5	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Autoclave	Unit	375.000
6	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Analitik 4 digit	Unit	750.000
7	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Analitik <4 digit	Unit	500.000
8	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Analitik 5 digit	Unit	1.000.000
9	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Mekanik	Unit	500.000
10	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Buret Biasa	Unit	200.000
11	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Buret Digital	Unit	225.000
12	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Buret Ganda	Unit	250.000
13	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Gelas Ukur	Unit	225.000
14	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Labu Ukur	Unit	200.000
15	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipet Ukur	Unit	225.000
16	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipet Volume	Unit	200.000
17	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Furnace 1 titik	Unit	650.000
18	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Furnace 2 titik	Unit	750.000
19	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Furnace 3 titik	Unit	950.000
20	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Hot Plate	Unit	325.000
21	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Oven /Inkubator/ Water Bath /Oil Bath/Refrigerator	Unit	750.000
22	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Termokopel/Termometer Digital	Unit	800.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
23	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Termometer Infra Red	Unit	750.000
24	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Thermohygrometer	Unit	650.000
25	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Diluter	Unit	300.000
26	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Dispenser	Unit	300.000
27	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipetter Fixed Volume	Unit	20.000
28	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipetter Multi	Unit	950.000
29	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pressure Gauge	Unit	350.000
30	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS)	Unit	2.000.000
31	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Conductivity Meter	Unit	900.000
32	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi DO Meter	Unit	400.000
33	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Gas Chromatography (GC)	Unit	2.000.000
34	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	Unit	2.000.000
35	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Polarimeter	Unit	950.000
36	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Refraktometer	Unit	1.750.000
37	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Salinity Meter	Unit	950.000
38	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi TDS meter	Unit	875.000
39	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Viskometer	Unit	950.000
40	Jasa Kalibrasi	Biaya Pengiriman Laporan dan Alat Kalibrasi	Unit	50.000
41	Jasa Kalibrasi	Biaya Petugas Kalibrasi	Unit	650.000
42	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Inductance Couple Plasma (ICP)	Unit	1.875.000
43	Jasa Kalibrasi	Hammer Test	Unit	1.100.000
44	Jasa Kalibrasi	Load Gauge 2000 kN	Unit	2.500.000
45	Jasa Kalibrasi	Proving Ring 200 Lbs	Unit	1.500.000
46	Jasa Kalibrasi	Proving Ring 2000 Lbs	Unit	1.500.000
47	Jasa Kalibrasi	Proving Ring 6000 Lbs	Unit	1.500.000
48	Jasa Kalibrasi	Proving Ring 10000 Lbs	Unit	1.500.000
49	Jasa Kalibrasi	Manometer	Unit	1.200.000
50	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Centrifuge	Unit	400.000
51	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Laminar Air Flow	Unit	3.800.000
52	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Lemari Asam (Fume Hood)	Unit	2.000.000
53	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Photometer	Unit	1.250.000
54	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Rotator	Unit	450.000
55	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Urine Analyzer	Unit	2.500.000



No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
56	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Doppler	Unit	440.000
57	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Dental unit	Unit	430.000
58	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Patient Monitor	Unit	650.000
59	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Bayi	Unit	400.000
60	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Nebulyzer	Unit	400.000
61	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat Laboratorium Umum Micropipette	Unit	816.000
62	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Suction	Unit	327.800
63	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi USG	Unit	700.000
64	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Flow meter O2	Unit	375.000
65	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Tensimeter	Unit	400.000
66	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Infant Warmer	Unit	760.000
67	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pulse Oximetry	Unit	450.000
68	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Baby CPAP	Unit	765.600
69	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Devibrilator	Unit	472.000
70	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi EKG	Unit	800.000
71	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Head Lamp	Unit	427.000
72	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Incubator	Unit	800.000
73	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Oxygen Concentrator	Unit	525.000
74	Jasa Kalibrasi	Biaya Kalibrasi Alat Laboratorium Umum Orbital shaker	Unit	424.000
75	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Thermometer	Unit	875.000
76	Jasa Kalibrasi	Biaya Kalibrasi Laboratorium umum Hematologi analyzer	Unit	700.000
77	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Dewasa	Unit	550.000
78	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Dispenser Lab	Unit	600.000
79	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Head Lamp	Unit	300.000
80	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Hematology Analyzer	Unit	3.250.000
81	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Hot Plate Laboratory	Unit	300.000
82	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Hot Sterillisator	Unit	600.000
83	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Incubator Laboratorium	Unit	700.000
84	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Laminar Air Flow	Unit	3.800.000
85	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Lemari Asam	Unit	2.000.000
86	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Micropipete Fix	Unit	500.000
87	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Micropipete Variabel	Unit	550.000
88	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Mixer	Unit	400.000
89	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Oven	Unit	850.000
90	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pengukur Tinggi Badan/Stature Meter	Unit	400.000
91	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Photometer	Unit	1.250.000
92	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipet	Unit	750.000
93	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Plasma Sterilisator	Unit	650.000
94	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Platelet Agitator	Unit	450.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
95	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Platelet Agitator Incubator	Unit	750.000
96	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Refrigerator Lab	Unit	650.000
97	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Spectrophotometer +	Unit	2.000.000
98	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Sphygmomanometer	Unit	350.000
99	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Sterilisator	Unit	850.000
100	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Termometer Klinik	Unit	450.000
101	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Thermometer Infrared	Unit	650.000
102	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Thermometer Refrigerator	Unit	350.000
103	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Thermometer Ruangan	Unit	400.000
104	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Analitik	Unit	450.000
105	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Badan dan Tinggi	Unit	450.000
106	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Laboratorium	Unit	450.000
107	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timer	Unit	400.000
108	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Urine Analyzer	Unit	2.500.000
109	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Volume Glassware (Pipete Gondok. Gelas Ukur. dll)	Unit	400.000
110	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Vortex Mixer	Unit	350.000
111	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Water Bath	Unit	650.000
112	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi colony Counter	Unit	1.000.000
113	Jasa Kalibrasi	Bourje	Unit	1.105.000
114	Jasa Kalibrasi	Tongkat Ukur (Tongkat Duga 1 x 2 Meter)	Unit	150.000
115	Jasa Kalibrasi	Neraca Sama Lengan	Unit	430.000
116	Jasa Kalibrasi	Salib Ukur (Salib Sumbu)	Unit	65.000
117	Jasa Kalibrasi	Tongkat Ukur (Tongkat Duga 2 x 1.5 Meter)	Unit	300.000
118	Jasa Kalibrasi	Tongkat Ukur (Tongkat Duga 2 x 2 Meter)	Unit	300.000
119	Jasa Kalibrasi	Komparator (Alat Uji Meter Kayu)	Unit	200.000
120	Jasa Kalibrasi	Neraca Sama Lengan	Unit	430.000
121	Jasa Kalibrasi	Anak Timbangan kelas F1 Crown - 1 g s.d 1 kg	Unit	1.950.000
122	Jasa Kalibrasi	Anak Timbangan kelas F1 Crown - 2 Kg s.d 5 Kg	Unit	450.000
123	Jasa Kalibrasi	Anak Timbangan kelas F1 Crown - 10 Kg	Unit	150.000
124	Jasa Kalibrasi	Anak Timbangan kelas F1 Crown - 20 Kg	Unit	150.000
125	Jasa Kalibrasi	Ukuran Ujung Lie Foe Indonesia	Unit	200.000
126	Jasa Kalibrasi	Ukuran Panjang (Dape Tape) - Ritche	Unit	450.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
127	Jasa Kalibrasi	Stopwatch - Seiko	Unit	200.000
128	Jasa Kalibrasi	Anak Timbangan kelas E2 - Viall Metrologies France	Unit	225.000
129	Jasa Kalibrasi	Ban Ukur - Yamayo Jepang	Unit	225.000
130	Jasa Kalibrasi	Pemeriksaan Sampel Pemantapan Mutu External - Kimia Air	Sampel	1.800.000
131	Jasa Kalibrasi	Pemeriksaan Sampel Pemantapan Mutu External - Lab Klinik	Sampel	1.800.000
132	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Repeater BPBD Cipala dan HT 01-40 Bergerak disekitar Kota Cilegon	Set	6.000.000
133	Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Gas On Site	Unit	27.825.000
134	Jasa Kalibrasi	Tongkat ukur Ukur (Duga 1 x 3 Meter) (3000 mm)	Buah	150.000
135	Jasa Kalibrasi	Gelas Ukur (1000 ml)	Buah	150.000
136	Jasa Kalibrasi	Jangka Sorong (Vernier Caliper) (300 mm)	Buah	300.000
137	Jasa Kalibrasi	Bejana Ukur (500 L)	Liter	160.000
138	Jasa Kalibrasi - Thermometer Digital	Merk Fluke; Type - 53 IIB; Range - s.d 500 C; Resolusi 0.1 C	Unit	540.000
139	Jasa Kalibrasi - Total Station Leica	Total Station Leica	Unit	283.500
140	Jasa Kalibrasi - Timbangan Elektronik	100kg/ 10g	Unit	810.000
141	Jasa Kalibrasi - Gauge Block	Merk Mitutoyo 1.00 mm - 60 mm	Unit	121.500
142	Jasa Kalibrasi - Hidrolic Pressure Calibrator	1 - 1000 psi	Unit	472.500
143	Jasa Kalibrasi - Pressure Standar Fluke	Merk Fluke 700 G	Unit	472.500
144	Jasa Kalibrasi - Kalibrator Tekanan Tensi Meter Fluke	-700 s.d 5000 mmHg	Unit	472.500
145	Jasa Kalibrasi - Ultrasonic Flow Meter	15 - 600 mm	Unit	1.012.500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
146	Jasa Kalibrasi - Komparator Van Becker	1000 mm / 0.1 mm	Unit	151.875
147	Jasa Kalibrasi - Jangka Sorong (Vernier Caliper)	0 - 1000 mm	Unit	1.012.500
148	Jasa Kalibrasi	Vaksin Refrigerator	Unit	697.444
149	Jasa Kalibrasi	- Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	1.000.000
150	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Timbangan Analitik 5 digit	Unit	1.200.000
151	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Timbangan Mekanik	Unit	600.000
152	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Buret Ganda	Unit	300.000
153	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Gelas Ukur	Unit	270.000
154	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Labu Ukur	Unit	240.000
155	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Pipet Volume	Unit	240.000
156	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Furnace 1 titik	Unit	780.000
157	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Furnace 2 titik	Unit	900.000
158	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Furnace 3 titik	Unit	1.140.000
159	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Oven /Inkubator/ Water Bath /Oil Bath/Refrigerator	Unit	900.000
160	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Termokopel/Termometer Digital	Unit	960.000
161	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Termometer Infra Red	Unit	900.000
162	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Thermohygrometer	Unit	550.000
163	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Diluter	Unit	550.000
164	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Dispenser	Unit	550.000
165	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Pipetter Fix	Unit	700.000
166	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Pipetter Multi	Unit	1.140.000
167	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Pressure Gauge	Unit	420.000
168	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS)	Unit	4.000.000
169	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Conductivity Meter	Unit	1.080.000
170	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi DO Meter	Unit	745.000
171	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	Unit	5.000.000
172	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Polarimeter	Unit	1.140.000
173	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Viskometer	Unit	1.140.000
174	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Autoclave	Unit	675.000
175	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Centrifuge	Unit	480.000
176	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Dispenser Lab	Unit	720.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
177	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Head Lamp	Unit	400.000
178	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Incubator Laboratorium	Unit	850.000
179	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Laminar Air Flow	Unit	5.000.000
180	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Lemari Asam	Unit	3.600.000
181	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Micropipete Variabel	Unit	750.000
182	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Oven Laboratorium	Unit	780.000
183	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Photometer	Unit	1.700.000
184	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Volume Glassware (Pipete Gondok. Gelas Ukur. dll)	Unit	324.000
185	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Platelet Agitator	Unit	540.000
186	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Refrigerator Lab/Obat	Unit	675.000
187	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Spectrophotometer	Unit	2.400.000
188	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Termometer	Unit	370.000
189	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Thermometer Refrigerator / Ruangan	Unit	600.000
190	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Timbangan Analitik	Unit	1.000.000
191	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Timbangan Badan dan Tinggi	Unit	600.000
192	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Timbangan Laboratorium	Unit	1.150.000
193	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Timer	Unit	600.000
194	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Urine Analyzer	Unit	3.250.000
195	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Vortex Mixer	Unit	420.000
196	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Water Bath	Unit	780.000
197	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi colony Counter	Unit	980.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
198	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi X Ray	Unit	1.700.000
199	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Imunologi Analyzer	Unit	7.000.000
200	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi PH Meter	Unit	1.140.000
201	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Vacum Pump	Unit	500.000
202	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Turbidimeter	Unit	1.050.000
203	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Hot Plate Laboratory	Unit	450.000
204	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi HbA1c Analyzer	Unit	4.800.000
205	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Examination Lamp	Unit	325.000
206	Jasa Kalibrasi	- Kalibrasi Timbangan Analitik	Unit	550.000
207	Jasa Kalibrasi - Gauge Block	- Merk Mitutoyo 1.00 mm - 60 mm	Unit	60.750

10. SATUAN BELANJA JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

Satuan Belanja Tenaga Ahli Non Konstruksi

Tabel 53.1  
Tenaga Ahli Konstruksi  
Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada  
Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman (tahun)			S1/Setara (dlm Rp.)	S2/Setara (dlm Rp.)	S3/Setara (dlm Rp.)
Ahli Muda	**	**	1	17.686.500	24.035.500	31.064.750
	**	**	2	19.047.000	25.622.750	32.878.750
Ahli Madya	**	1	3	20.634.250	27.436.750	34.692.750
	**	2	4	21.994.750	29.250.750	36.506.750
	**	3	5	23.355.250	30.838.000	38.320.750
Ahli Utama	1	4	6	24.715.750	32.652.000	40.134.750
	2	5	7	26.076.250	33.785.750	41.948.750
	3	6	8	27.436.750	36.053.250	43.762.750
	4	7	9	29.024.000	37.640.500	45.576.750
	5	8	10	30.384.500	39.454.500	47.390.750
	6	9	11	31.745.000	41.268.500	49.204.750
	7	10	12	33.105.500	42.855.750	51.018.750
	8	11	13	34.466.000	44.669.750	52.832.750
	9	12	14	35.826.500	46.257.000	54.646.750
	10	13	15	37.413.750	48.071.000	56.460.750
	11	14	16	38.774.250	49.885.000	58.274.750
	12	15	17	40.134.750	51.472.250	60.088.750
	13	16	18	41.495.250	53.286.250	61.902.750
	14	17	19	42.855.750	54.873.500	63.716.750
	15	18	20	44.216.250	56.687.500	65.530.750
	16	19	21	45.803.500	58.274.750	67.344.750
	17	20	22	47.164.000	60.088.750	69.158.750
	18	21	23	48.524.500	61.902.750	70.972.750
	19	22	24	49.885.000	63.490.000	72.786.750
	20	23	25	51.245.500	65.304.000	74.600.750

Tabel 53.2  
Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada  
Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

Pengalaman (tahun)	S1/Setara (dlm Rp.)	S2/Setara (dlm Rp.)	S3/Setara (dlm Rp.)
1	30.838.000	52.832.750	56.007.250
2	36.506.750	58.501.500	61.902.750
3	42.175.500	64.170.250	68.025.000
4	47.844.250	69.612.250	73.920.500
5	53.286.250	75.281.000	79.816.000
6	58.955.000	80.949.750	85.938.250
7	64.623.750	86.618.500	91.833.750

Pengalaman (tahun)	S1/Setara (dlm Rp.)	S2/Setara (dlm Rp.)	S3/Setara (dlm Rp.)
8	70.292.500	92.287.250	97.729.250
9	75.734.500	97.956.000	103.851.500
10	81.403.250	103.398.000	109.747.000
11	87.072.000	109.066.750	115.642.500
12	92.740.750	114.735.500	121.538.000
13	98.182.750	120.404.250	127.660.250
14	103.851.500	126.073.000	133.555.750
15	109.520.250	131.741.750	139.451.250
16	115.189.000	137.183.750	145.573.500
17	120.631.000	142.852.500	151.469.000
18	126.299.750	148.521.250	157.364.500
19	131.968.500	154.190.000	163.486.750
20	137.637.250	159.858.750	169.382.250
21	143.079.250	165.300.750	175.277.750
22	148.748.000	170.969.500	181.173.250
23	154.416.750	176.638.250	187.295.500
24	160.085.500	182.307.000	193.191.000
25	165.527.500	187.975.750	199.086.500

Tabel 53.3

Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada  
Jenjang Jabatan Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional Atau Seleksi  
Internasional

Pengalaman (Tahun)	S1/Setara (dlm Rp.)	S2/Setara (dlm Rp.)	S3/Setara (dlm Rp.)
1	88.432.500	151.242.250	160.312.250
2	104.531.750	167.114.750	177.318.500
3	120.631.000	183.214.000	194.324.750
4	136.503.500	199.313.250	211.331.000
5	152.602.750	215.412.500	228.337.250
6	168.702.000	231.511.750	245.570.250
7	184.801.250	247.611.000	262.576.500
8	200.673.750	263.710.250	279.582.750
9	216.773.000	279.809.500	296.589.000
10	232.872.250	295.908.750	313.595.250
11	248.971.500	312.008.000	330.601.500
12	264.844.000	328.107.250	347.834.500
13	280.943.250	344.206.500	364.840.750
14	297.042.500	360.305.750	381.847.000
15	313.141.750	376.405.000	398.853.250
16	329.014.250	392.277.500	415.859.500
17	345.113.500	408.376.750	432.865.750
18	361.212.750	424.476.000	449.872.000
19	377.085.250	440.575.250	467.105.000
20	393.184.500	456.674.500	484.111.250
21	409.283.750	472.773.750	501.117.500
22	425.383.000	488.873.000	518.123.750
23	441.255.500	504.972.250	535.130.000
24	457.354.750	521.071.500	552.136.250
25	473.454.000	537.170.750	569.369.250



11. BIAYA JASA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah **tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN** yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik dan kondisi objektif daerah, serta sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan atau Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. Lurah dan Camat selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak.

Tabel 55  
Jasa Insentif Pajak dan Retribusi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah	Tahun	5% dari Target Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah	Tahun	5% dari Target Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah

12. SATUAN BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT

Satuan biaya sewa kendaraan dialokasikan untuk :

- a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil.

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

1. Pejabat Negara/Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat;
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat); dan
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost.

Tabel 56

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil (Update)

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (dlm Rp.)	RODA 6/ BUS SEDANG (dlm Rp.)	RODA 6/ BUS BESAR (dlm Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3.	RIAU	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	979.000	2.373.000	3.910.000
5.	JAMBI	Per hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	922.000	2.124.000	3.300.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	1.307.000	2.200.000	4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	985.000	4.763.000	6.449.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	BANTEN	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.139.000	2.439.000	3.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	1.270.000	2.673.000	4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	905. 000	2.247.000	3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000
17.	BALI	Per hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (dlm Rp.)	RODA 6/ BUS SEDANG (dlm Rp.)	RODA 6/ BUS BESAR (dlm Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	857.000	3.039.000	3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	837.000	2.630.000	3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	792.000	2.504.000	4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33.	PAPUA	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023  
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024*

b. Sewa Kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan kecuali BBM.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Tabel 57  
Beban Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau lapangan.

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat			
1	Pejabat Eselon I	Per Bulan	17.660.000
2.1	Pejabat Eselon II	Per Bulan	13.950.000
2.2	Pejabat Eselon II (2000 CC)	Per Bulan	13.500.000
3	Pejabat Eselon III (1550 CC)	Per Bulan	7.270.000
b. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan			
1	Pick UP	Per Bulan	5.400.000
2	Minibus	Per Bulan	5.670.000
3	Double Gardan	Per Bulan	14.480.000
c. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan			
1	Pejabat Eselon III	Per Bulan	10.000.000

Tambahan Tabel 58  
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bus Excektive	Legrest, Toilet, Smoking Area, Seat 2-2, Tol, Dispenser, Selimut	Per hari	12.000.000
2.	Bus Super Excektive	Legrest, Toilet, Smoking Area, Seat 2-1, Tol, Dispenser, Selimut	Per hari	14.000.000
4	Bus Biasa	Kapasitas s.d 50 Orang	Per Hari	10.000.000

Tabel 59  
Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pick Up		Per hari	12.000.000
2.	Mobilisasi Alat Berat	Ritase/PP	Kali	3.000.000
3.	Sewa Kendaraan Angkutan Barang	Truk	Hari	1.800.000
4.	Sewa Kendaraan Angkutan Barang	Truck Box	Hari	6.000.000

c. Biaya bahan bakar yang bersumber dari sewa.

Tabel 60  
Bahan Bakar Yang Bersumber Dari Sewa

NO	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Walikota / Ketua DPRD	Per Bulan	1.750.000
2	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD	Per Bulan	1.650.000
3	Sekretaris Daerah	Per Bulan	1.500.000
4	Eselon II	Per Bulan	1.250.000
5	Eselon III	Per Bulan	950.000
6	Eselon IV	Per Bulan	700.000

- d. Sewa peralatan dan perlengkapan kantor lainnya; dialokasikan untuk sewa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan dan harga pasaran yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian.
- e. sewa mesin alat berat; dialokasikan untuk sewa mesin alat berat sesuai kebutuhan dan harga pasaran yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian.
- f. sewa tanaman hias; dialokasikan untuk sewa tanaman hias sesuai kebutuhan dan harga pasaran yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian.
- g. sewa aplikasi/server internet; dialokasikan untuk sewa aplikasi/server internet sesuai kebutuhan dan harga pasaran yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian.
- h. sewa peralatan dan perlengkapan kantor lainnya atau Sewa Peralatan Bantu, Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor, Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan.
- i. Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu

Tabel 61.1  
Beban Sewa Excavator. Beban Sewa Alat Pengangkat. dan Beban Sewa Alat Bantu Lainnya.

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Alat Berat - Excavator	200 HP	Jam	380.000
2	Sewa Alat Berat - Excavator	200 HP	Per Hari	3.150.000
3	Sewa Alat Berat - Forklift	3 Ton	Jam	320.000
4	Sewa Alat Berat - Forklift	3 Ton	Per Hari	2.600.000
5	Sewa Alat Berat - Crane	10 - 15 Ton	Jam	350.000
6	Sewa Alat Berat - Crane	10 - 15 Ton	Per Hari	2.800.000
7	Sewa Alat Berat - Crane	20 Ton	Jam	650.000
8	Sewa Alat Berat - Crane	20 Ton	Per Hari	5.200.000
9	Sewa Alat Berat - Crane	35 Ton	Jam	850.000
10	Sewa Alat Berat - Crane	35 Ton	Per Hari	6.800.000
11	Sewa Scaffolding		Per Hari	175.000

Tabel 61.2  
Beban Sewa Kapal Terbang

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Kapal Terbang	Drone	Hari	1.250.000

Tabel 61.3  
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Alat Penggandaan	Mesin Fotocopy	Unit / Bulan	2.000.000

Tabel 61.4  
Beban Sewa Mebel

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Kursi	Kursi Lipat	Unit	15.000
2	Sewa Kursi	Kursi Futura	Unit	22.000
3	Sewa Kursi	Kursi VIP	Unit	30.000
4	Sewa Mebel	Meja	Buah	75.000
5	Sewa Mebel	Meja + Alas Meja	Unit	210.000

Tabel 61.5  
Beban Sewa Kapal Terbang

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Kapal Terbang	Drone	Hari	1.250.000

Tabel 61.6  
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Alat Penggandaan	Mesin Fotocopy	Unit / Bulan	2.000.000

Tabel 61.7  
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	Toilet Portable	Buah	2.750.000
2	Sewa Tenda	Tenda VVIP	M2	83.000
3	Sewa Tenda	Panggung Rigging VIP	M2	75.000
4	Sewa Tenda	Tenda Penerima Tamu Uk. 3X3 M	Unit	650.000
5	Sewa Lampu	Lampu Mercury	Unit	120.000
6	Sewa Tenda	Tenda Penerima Tamu Uk. 5x5 M	M2	800.000
7	Sewa Tenda	Tenda Kerucut 5 x 5	Unit	625.000
8	Sewa Tenda	Tenda Kerucut 3 x 3	Unit	475.000
9	Sewa Tenda	Tenda Ringgi (Panggung)	M2	110.000
10	Sewa Tenda	Tenda Roder	M2	90.000
11	Sewa Tenda	Tenda Roder Dekorasi	M2	110.000
12	Sewa Tenda	Tenda Semi Dekorasi, Tenda Canopy Dekorasi	M2	35.000
13	Sewa Tenda	Tenda Plafon	M2	25.000
14	Sewa Tenda	Tenda Dekorasi VIP (Tertutup)	M2	70.000
15	Sewa Tenda	Tenda Dekorasi	M2	45.000
16	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	Sewa Border	M	80,000
17	Karpet	Karpet	M2	30.000
18	Sewa Perlengkapan Lain	Sofa VIP	Unit	700.000
19	Meja Stand	Meja Stand Cover	Unit	200.000
20	Tenda	Kerucut	Unit	800.000
21	Sewa Flooring Tenda	Panggung Acara	M2	35.000
22	Sewa Flooring Tenda	Permadani,	Unit	300.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Sewa Flooring Tenda	Panggung	M2	300.000
24	Sewa Perlengkapan Lain	Lampu TL	Unit	50.000
25	Sewa Perlengkapan Lain	Kipas Angin	Unit	75.000
26	Sewa Perlengkapan Lain	Misty Fan (Kipas Angin Air)	Unit	450.000
27	Sewa Perlengkapan Lain	Meja Kotak + Cover	Unit	60.000
28	Sewa Perlengkapan Lain	Meja Bulat + Cover (Uk. Diameter 160 cm)	Unit	150.000
29	Sewa Perlengkapan Lain	Meja Bulat + Cover (Uk. Diameter 120 cm)	Unit	75.000
30	Sewa Perlengkapan Lain	Kursi Lipat	Unit	17.500
31	Sewa Perlengkapan Lain	Kursi Futura	Unit	20.000
32	Sewa Perlengkapan Lain	Sofa VIP	Unit	700.000

Tabel 61.8  
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film dan Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 1.000 Watt	Kegiatan	1.500.000
2	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 2.000 Watt	Kegiatan	2.500.000
3	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 3.000 Watt	Kegiatan	3.000.000
4	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 4.000 Watt	Kegiatan	3.500.000
5	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 5.000 Watt	Kegiatan	4.000.000
6	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 6.000 Watt	Kegiatan	5.000.000
7	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 8.000 Watt	Kegiatan	6.000.000
8	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 10.000 Watt	Kegiatan	7.5000.000
9	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 12.000 Watt	Kegiatan	12.000.000
10	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 15.000 Watt	Kegiatan	13.000.000
11	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 20.000 Watt	Kegiatan	17.000.000



No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 30.000 Watt	Kegiatan	27.000.000
13	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 40.000 Watt	Kegiatan	35.000.000
14	Sewa Peralatan Audio dan Video	Sound System 50.000 Watt	Kegiatan	37.000.000
15	Sewa Peralatan Audio dan Video	Videobooth 360	Unit	5.000.000
16	Sewa Peralatan Audio dan Video	Videotron	Unit	20.000.000
17	Sewa Peralatan Audio dan Video	Video Liputan	Set	10.000.000
18	Sewa Peralatan Audio dan Video	Video Live Streaming	Set	10.000.000
19	Sewa Peralatan Ukur Tanah	GPS Geodetik	Hari	1.750.000

Tabel 61.9  
Beban Sewa Peralatan Jaringan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Virtual Private Server (VPS)	Ram 4 GB. CPU 4 cores. SSD 70 GB	Tahun	4.128.000
2	Sewa Virtual Private Server (VPS)	Ram 8 GB. CPU 8 cores. SSD 120 GB	Tahun	9.000.000
3	Sewa Virtual Private Server (VPS)	Ram 16 GB. CPU 16 cores. SSD 200 GB	Tahun	17.400.000
4	Sewa Virtual Private Server (VPS)	Ram 32 GB. CPU 32 cores. SSD 320 GB	Tahun	26.880.000

Tabel 61.10  
Beban Sewa Peralatan Bantu, Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor,  
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan.

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Stand Acara	Stand Acara Tertentu atau Stand dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	20.000.000
2	Sewa Stand Acara/ Pameran Luar Kota	Stand. BUMN/BUMD/Dinas/ Perbankan/Internasional	Kegiatan	45.000.000
3	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	200.000.000
4	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	165.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	150.000.000
6	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	140.000.000
7	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	130.000.000
8	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	120.000.000
9	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	115.000.000
10	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	110.000.000
11	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	75.000.000
12	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	70.000.000
13	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	65.000.000
14	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	60.000.000
15	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	40.000.000
16	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	85.000.000
	Sewa Bangunan dan Gedung	Bangunan / Gedung Kantor / Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit / Tahun	10.000.000
17	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Kapasitas Lebih dari 300 Orang	Per Hari	13.299.000
18	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Kapasitas s.d 50 Orang	Hari	3.000.000
19	Sewa Bangunan Gedung	Kapasitas s.d 100 Orang	Hari	5.500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tempat Pertemuan			

Tabel 61.11  
Beban Sewa Hotel

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beban Sewa Hotel	Sewa Penginapan - Hotel Bintang Satu	Hari	425.000
2	Beban Sewa Hotel	Sewa Penginapan - Hotel Bintang Dua	Hari	575.000
3	Beban Sewa Hotel	Sewa Penginapan - Hotel Bintang Tiga	Hari	650.000
4	Beban Sewa Hotel	Sewa Penginapan - Hotel Bintang Empat	Hari	980.000
5	Beban Sewa Hotel	Sewa Penginapan - Cottage	Hari	4.250.000

Tabel 61.12  
Beban Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya, dan Beban Sewa Tanaman

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Sewa Tanaman	Beban sewa Tanaman - sewa Tanaman Hias	Buah	75.000

Tabel 61.13  
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Aplikasi Virtual Meeting	Akun Profesional. maks 100 peserta	Tahun	1.615.471
2	Sewa Aplikasi Virtual Meeting	Akun Profesional. maks 300 peserta	Tahun	2.154.320
3	Sewa aplikasi desain grafis/infografis (web-based)	Akun profesional/premium for teams (lebih dari 2 user)	Tahun	2.100.000
4	Layanan SMTP (Single Pricing Transactional Email)	Fitur Advanced Sender Domain	Entry	16.650
5	Sewa WhatsApp Bot/ Blast	WhatsApp Bot/ Blast Pemerintah Kota Cilegon	Bulan	1.998.000
6	Sewa SSL Email	SSL Email Pemerintah Kota Cilegon	Domain	16.650
7	Sewa Sistem	Sistem Aplikasi ePuskesmas untuk dalam gedung	Bulan	555.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Sewa Sistem	Sistem Aplikasi ePuskesmas untuk Dalam Gedung dan Luar Gedung seperti Posbindu. Poskesdes. Pustu. Polindes. eFramasi	Bulan	1.110.000
9	Sewa Sistem	Sistem Aplikasi eFarmasi	Bulan	2.775.000
10	Vaksin Data Loger	Managed service untuk vaksin data loger monitoring Internet dan pemeliharaan untuk alat ukur pemantauan suhu vaksin	Bulan	222.000
11	Sewa Aset Tidak Berwujud - Software	Software Intelligence Media Analytics (IMA)	Bulan	15.000.000
12	Sewa Aset Tidak Berwujud - Software	Aplikasi PPDB	Bulan	25.000.000

### 13. SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ ASURANSI

Satuan biaya iuran jaminan/ asuransi dialokasikan kepada:

a. masyarakat penerima bantuan iuran;

Satuan biaya premi untuk masyarakat penerima bantuan iuran berupa asuransi kesehatan.

b. pegawai Non ASN;

Satuan biaya premi untuk pegawai Non ASN berupa asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.

Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.

c. Beban Asuransi Barang Milik Daerah;

Satuan biaya premi untuk barang milik daerah berupa asuransi atas:

1. kendaraan dinas/operasional;

Satuan biaya premi untuk kendaraan dinas/operasional berupa asuransi barang milik daerah.

2. bangunan gedung bertingkat.

Satuan biaya premi bangunan gedung bertingkat berupa asuransi barang milik daerah.

Tabel 62  
JASA PREMI ASURANSI

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	Belanja premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Premi Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD II	Orang	37.800
2	Iuran Jaminan Kesehatan	Bantuan Iuran bagi PBPU dan BP Kelas 3 Aktif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Wilayah Kota Cilegon	Orang	2.800
3	BPJS Kesehatan	Non Aparatur Sipil Negara	Orang / Bulan	215.489
4	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT)	THL	Orang / Bulan	74.200
5	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT)	TKK - SMA	Orang / Bulan	76.320
6	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT)	TKK - D3	Orang / Bulan	82.680
7	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT)	TKK - S1	Orang / Bulan	89.040

Tabel 63  
Beban Asuransi Barang Milik Daerah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah			
1	Asuransi Kendaraan	Roda 4 Tahap 2	Kegiatan	500.000.000
2	Asuransi Kendaraan	Roda 4 Tahap 1	Kegiatan	796.000.000
3	Asuransi Kendaraan	Roda 2	Kegiatan	155.000.000
4	Asuransi Gedung	Gedung Setda	Kegiatan	200.000.000
5	Asuransi Gedung	Gedung Setda 6 Lantai	Kegiatan	200.000.000

#### 14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor lainnya merupakan satuan biaya di luar pengenaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, yang digunakan untuk mempertahankan barang investasi kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, personal computer/notebook, Printer, Alat Bengkel, Alat Besar, alat laboratorium dan/atau barang sarana kantor lainnya yang sejenis agar berada dalam kondisi normal/beroperasi dengan baik.

Tabel 64.1  
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel  
Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeliharaan Mesin Potong	Mesin Potong Kayu ( <i>chainsaw</i> )	Unit / Tahun	2.000.000

Tabel 64.2  
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tanggal

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeliharaan Alat Kantor - Mesin Ketik	Jasa Cleaning. Reparasi/Perbaikan Mesin Ketik	Unit	380.000
2	Pemeliharaan Mesin Foto Copy	Pergantian Suku Cadang dan Jasa Service	Unit / Tahun	5.000.000
3	Pemeliharaan Alat Penggandaan	Mesin Fotocopy	Unit / Bulan	4.000.000
4	Pemeliharaan Alat Kantor	Mesin Porporasi	Unit	10.200.000
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Alat Perekam Data (Tapping Box)	Unit	405.000
6	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	Pemeliharaan CCTV	Tahun	5.000.000
7	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Inventaris Kantor (Mebel ; Meja / Kursi)	Unit / Tahun	80.000
8	Pemeliharaan Mesin Potong	Mesin Potong Rumput	Unit / Tahun	1.500.000
9	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Air Conditioner (AC)	Unit / Tahun	610.000
10	Pemeliharaan AC	AC Cassete	Unit / Tahun	1.400.000
11	Pemeliharaan AC	AC Standing	Unit / Tahun	1.000.000
12	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	(Home Use) Sewa Lampu TL	Unit	120.000

Tabel 64.3  
Beban Pemeliharaan Komputer

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Personal Computer / Notebook	Unit / Tahun	730.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Printer	Unit / Tahun	690.000
3	Beban Pemeliharaan Service Alat Perekaman KTP-el	Beban Jasa Kantor Lainnya - Jasa Service Alat Perekaman KTP-el	Set	3.500.000
4	Pemeliharaan Jaringan System Aplikasi	Jasa Perawatan Jaringan System SIAK	Bulan	3.000.000
5	Pemeliharaan Server	Jasa Perawatan Server	Bulan	5.000.000
6	Beban Pemeliharaan Komputer – Peralatan Komputer – Peralatan Jaringan ISPU	Pemeliharaan Komputer dan Jaringan ISPU	Unit	1.890.000

Tabel 64.4  
Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeliharaan Jaringan Listrik	Panel Instalasi MV dan LV	Kali	9.500.000
2	Pemeliharaan Jaringan Listrik	Purifikasi Treatment Trafo 1250 KVA	Unit / Tahun	30.000.000

Tabel 64.5  
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Gedung Bertingkat; Kerusakan Kurang Dari atau Sama Dengan 2%	M2/Tahun	202.000
2	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Gedung Tidak Bertingkat; Kerusakan Kurang Dari atau Sama Dengan 2%	M2/Tahun	114.000
3	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Halaman Gedung / Bangunan Kantor; Kerusakan Kurang Dari atau Sama Dengan 2%	M2/Tahun	11.000

15. BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

a. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Tabel 65

Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Upah Tenaga Kerja Lainnya	Orang/Hari	110.000
2	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Upah Tenaga Petukang Lainnya	Orang/Hari	130.000
3	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Pekerja	Orang/Hari	170.000
4	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Batu	Orang/Hari	220.000
5	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Kayu	Orang/Hari	220.000
6	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Besi Beton	Orang/Hari	230.000
7	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Aluminium	Orang/Hari	250.000
8	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Interior	Orang/Hari	250.000
9	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Kaca	Orang/Hari	200.000
10	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Bor	Orang/Hari	250.000
11	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Listrik	Orang/Hari	200.000
12	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Tukang Pipa	Orang/Hari	200.000
13	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Kepala Tukang	Orang/Hari	250.000
14	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Mandor	Orang/Hari	300.000
15	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Kenek / Pembantu Supir	Orang/Hari	200.000
16	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Supir Truk	Orang/Hari	350.000
17	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Supir Pribadi	Orang/Hari	250.000
18	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Mekanik Setengah Terampil	Orang/Hari	200.000
19	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Mekanik Terampil	Orang/Hari	250.000
20	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Operator Setengah Terampil Alat Berat	Orang/Hari	250.000
21	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Operator Terampil Alat Berat	Orang/Hari	350.000
22	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Pembantu Operator	Orang/Hari	200.000



No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Crew Bor	Orang/Hari	200.000
24	Biaya Upah Pekerja/Petukang	Juru Las	Orang/Hari	280.000
25	Jasa Instalasi	Pembongkaran dan Pemasangan Instalasi Videowall	Kegiatan	25.000.000

b. Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan

Tabel 66

Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Uang Hadiah Perlombaan	Juara I STQ / MTQ di Kelurahan	Orang	1.000.000
2	Uang Hadian Perlombaan	Juara II STQ / MTQ di Kelurahan	Orang	750.000
3	Uang Hadian Perlombaan	Juara III STQ / MTQ di Kelurahan	Orang	500.000
4	Uang Hadiah Perlombaan	Juara I STQ / MTQ di Kecamatan	Orang	1.500.000
5	Uang Hadian Perlombaan	Juara II STQ / MTQ di Kecamatan	Orang	1.000.000
6	Uang Hadian Perlombaan	Juara III STQ / MTQ di Kecamatan	Orang	750.000
7	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan / Suatu Penghargaan	Juara 1 (Perorangan)	Orang	3.000.000
8	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan / Suatu Penghargaan	Juara 2 (Perorangan)	Orang	2.500.000
9	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan / Suatu Penghargaan	Juara 3 (Perorangan)	Orang	2.000.000
10	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan / Suatu Penghargaan	Juara 1 (Perorangan)	Orang	2.500.000
11	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan / Suatu Penghargaan	Juara 2 (Perorangan)	Orang	2.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
12	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara 3 (Perorangan)	Orang	1.500.000
13	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara 1 (Perorangan)	Orang	1.000.000
14	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara 2 (Perorangan)	Orang	750.000
15	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara 3 (Perorangan)	Orang	500.000
16	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 1 (Perorangan)	Orang	1.500.000
17	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 2 (Perorangan)	Orang	1.000.000
18	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 3 (Perorangan)	Orang	750.000
19	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 1 (Perorangan)	Orang	1.250.000
20	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 2 (Perorangan)	Orang	1.000.000
21	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 3 (Perorangan)	Orang	750.000
22	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara 1 (Beregu)	Group	5.000.000
23	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara 2 (Beregu)	Group	4.000.000
24	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara 3 (Beregu)	Group	3.000.000
25	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 1 (Beregu)	Group	2.500.000
26	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 2 (Beregu)	Group	2.000.000
27	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan/Suatu Penghargaan	Juara Harapan 3 (Beregu)	Group	1.500.000
28	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan / Suatu Penghargaan (Sayembara Gagasan Kawasan Kota Cilegon)	Juara 1	Orang	150.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4	5
29	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan / Suatu Penghargaan (Sayembara Gagasan Kawasan Kota Cilegon)	Juara 2	Orang	100.000.000
30	Uang Hadiah yang Bersifat Perlombaan / Suatu Penghargaan (Sayembara Gagasan Kawasan Kota Cilegon)	Juara 3	Orang	50.000.000

c. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Tabel 67

Akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	4	5
1	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi	Lembaga	20.060.000

16. BIAYA TRANSPORT DARAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Transport Darat dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan biaya transport diberikan kepada :
  - a. pejabat negara;
  - b. pejabat daerah;
  - c. PNS/non PNS; dan
  - d. pihak lain.
2. Satuan biaya diberikan dengan ketentuan sebagaimana tertuang Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

17. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN ASN

Satuan Beasiswa dialokasikan untuk bantuan tugas akhir. bantuan uang saku. diberikan kepada ASN yang melaksanakan :

1. Beasiswa Tugas Belanja Strata I (S1)
2. Beasiswa Tugas Belanja Strata II (S2)
3. Beasiswa Tugas Belanja Strata III (S3)

Tabel 68  
Beban Beasiswa

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beasiswa Tugas Belajar Strata I (S1)	Bantuan Tugas Akhir	Per Orang	1.500.000
2	Beasiswa Tugas Belajar Strata II (S2)	Luar Negeri	Per Orang	6.600.000
3	Beasiswa Tugas Belajar Strata II (S2)	Bantuan Uang Saku	Orang / Bulan	750.000
4	Beasiswa Tugas Belajar Strata II (S2)	Bantuan Tugas Akhir	Per Orang	2.000.000
5	Beasiswa Tugas Belajar Strata III (S3)	Bantuan Tugas Akhir	Per Orang	3.000.000

WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA CILEGON

STANDAR BIAYA UMUM SELAIN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL  
YANG DITETAPKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP EFISIENSI,  
EFEKTIVITAS, KEPATUTAN, DAN KEWAJARAN SESUAI DENGAN  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MERUPAKAN  
MUATAN LOKAL SERTA HANYA BERLAKU DI PERANGKAT DAERAH  
TERTENTU

1. STANDAR BELANJA MENGACU PADA ALOKASI DANA TRANSFER UMUM  
DAN DANA TRANSFER KHUSUS

Satuan Biaya yang melekat kepada Perangkat Daerah yang tidak dapat  
terpisahkan dengan Alokasi Dana Transfer Pusat Khusus (DTK) dan Dana  
Transfer Pusat Umum (DTU) mengacu pada petunjuk pelaksanaan atau  
petunjuk teknis pelaksanaan penyerapan DTU dan DTK masing-masing  
bidang dapat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, serta mengacu  
pada peraturan perundang-undangan.

2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :

a. BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN FULL SARJANA

Satuan Biaya jasa program pendidikan full sarjana (strata 1) mengacu  
pada Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Program  
Kartu Sejahtera (KCS) dengan besaran ditetapkan dengan Keputusan  
Wali Kota Cilegon. Adapun bantuan Pendidikan diberikan kepada :

- 1. Belanja Beasiswa Tidak Mampu (Peserta Didik)
- 2. Belanja Beasiswa (Mahasiswa)

Tabel 69

Biaya Program Pendidikan Full Sarjana

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Beasiswa Tidak Mampu	Peserta Didik	Orang	750.000
2	Belanja Beasiswa	Mahasiswa	Orang	3.000.000

b. SATUAN BIAYA BEBAN JASA TENAGA PENDIDIKAN

Tabel 70.1

Biaya Beban Jasa Tenaga Pendidikan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jasa Tenaga Pendidikan	Ketua PKBM	Orang	675.000
2	Jasa Tenaga Pendidikan	Bendahara PKBM	Orang	675.000
3	Jasa Tenaga Pendidikan	Sekretaris PKBM	Orang	675.000
4	Jasa Tenaga Pendidikan	Pengelola Kelompok Belajar Paket A, B dan C	Orang	675.000
5	Jasa Tenaga Pendidikan	Tutor A, B dan C	Orang	675.000
6	Jasa Tenaga Pendidikan	Ketua TBM	Orang	675.000
7	Jasa Tenaga Pendidikan	Sekretaris TBM	Orang	675.000
8	Jasa Tenaga Pendidikan	Honorarium Daerah - Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri diatas 10 tahun	Orang / Bulan	1.000.000
9	Jasa Tenaga Pendidikan	Honorarium Daerah - Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Swasta Jenjang SD Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang / Bulan	675.000
10	Jasa Tenaga Pendidikan	Honorarium Daerah - Guru Non PNS Sekolah Swasta Jenjang SMP	Orang / Bulan	675.000
11	Jasa Tenaga Pendidikan	Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS PAUD Non Formal	Orang / Bulan	675.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Jasa Tenaga Pendidikan	Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK Negeri dan TK Satap	Orang / Bulan	750.000
13	Jasa Tenaga Pendidikan	Honorarium Guru dan Tenaga Pendidikan Non PNS TK Swasta	Orang / Bulan	675.000
14	Jasa Tenaga Pendidikan	Insentif DAPODIK	Orang / Bulan	450.000
15	Jasa Tenaga Pendidikan	Operator DAPODIK (Non PNS)	Orang / Bulan	450.000
16	Jasa Tenaga Pendidikan	Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan NON PNS di Sekolah Perbatasan	Orang / Bulan	500.000
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS SMP NEGERI	Tahun	675.671.146
18	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SMP NEGERI	Tahun	1.098.756.695
19	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja SD	Tahun	1.315.000.000
20	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS REGULER TK NEGERI	Tahun	529.480.000
21	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS REGULER PKBM NEGERI	Tahun	86.970.000
22	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	- Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS REGULER SD NEGERI	Tahun	30.599.467.824
23	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	- Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS REGULER SMP NEGERI	Tahun	9.217.092.159
24	Honorarium Bendahara BOSP/BOSDA	Bendahara BOS SMP/BOSDA	Orang / Bulan	600.000
25	Honorarium Bendahara BOSP/BOSDA	Bendahara BOS SD/BOSDA	Orang / Bulan	500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Honorarium Bendahara BOSP/BOSDA	Bendahara BOS PAUD/BOSDA	Orang / Bulan	300.000
27	Honorarium Operator BOSP/BOSDA	Operator BOS SMP/BOSDA	Orang / Bulan	500.000
28	Honorarium Operator BOSP/BOSDA	Operator BOS SD/BOSDA	Orang / Bulan	400.000
29	Honorarium Operator BOSP/BOSDA	Operator BOS PAUD/BOSDA	Orang / Bulan	200.000

c. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud - Software

Tabel 70.2  
Sewa Aset Tidak Berwujud \_ Software

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Aset Tidak Berwujud - Software	Aplikasi PPDB	Bulan	25.000.000

2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dengan maksud menunjukan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum diberikan Forkopimda provinsi, kabupaten/kota dan forkopimcam melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membentuk struktur keanggotaan Forkopimda Kota Cilegon sebagai berikut :

- Ketua Forkopimda : Wali Kota Cilegon
- Anggota Forkopimda terdiri dari :
  - Ketua DPRD
  - Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kota Cilegon
  - Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cilegon
  - Komandan komando distrik militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia angkatan laut, dan komando pangkalan tentara nasional Indonesia angkatan udara
- Unsur tim Pendukung dan tim Sekretariat Forkopimda Cilegon meliputi :
  - Anggota Unsur tim pendukung terdiri dari :



- Wakil Wali Kota Cilegon
- TNI AL (dandim) Provinsi Banten
- Komandan Batalyon 13 Group 1 Kopassus
- Anggota Unsur Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Forkopimda terdiri dari :
  - Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Cilegon
  - Ketua : Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon
  - Sekretaris : Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Cilegon
  - Anggota : Unsur Badan Kesbangpol

Adapun besaran honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 300/Kep.36-KesbangPol/2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Kota Cilegon.

Tabel 71.1  
Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)		
	a. Ketua : Walikota	Orang / Bulan	13.000.000,-
	b. Anggota (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon; Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon; Kepala Kepolisian Resort Cilegon; Komando Distrik Militer 0623 Cilegon)	Orang / Bulan	12.000.000,-
2	Honorarium Tim Pendukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) : Anggota (Wakil Wali Kota; Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banten; Komandan Batalyon 13 (Danyon 13 ) Grup 1 Kopassus)	Orang / Bulan	9.230.000,-
3	Honorarium Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) – Sekretaris Daerah	Orang / Bulan	8.000.000,-

*Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 300/Kep.36-KesbangPol/2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Kota Cilegon.*

b. Upah Harian Jasa Pengamanan Wilayah dan Pengamann Pilkada

Tabel 71.2

Upah Harian Jas Pengamanan Wilayah dan Pengamana Pilkada

No	Uraian	Sepsifikasi	Satuan	Besaran
1	Upah Harian Jasa Pengamanan Wilayah dan Pengamana Pilkada	Polres, Kodim, Lanal	Hari	100.000

3. DINAS KESEHATAN

a. Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Tenaga Kesehatan

Satuan biaya jasa pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi JKN berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Diberikan kepada pelaksanaan pemeriksa ANC, persalinan pervaginam normal, pelayanan tindakan pasca persalinan, pemeriksaan post natal care (PNC), pemasangan/pencabutan implant/AKDR, pelayanan suntik KB, dan pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan. Yang diberikan kepada pihak yang menangani sesuai dengan kasus pelayanan.

Pengenaan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan penetapan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 400/Kep.57-Eksda/2023.

Tabel 72.1

Jasa Pelayanan Kesehatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	persalinan pervaginam normal ditolong oleh tim 1 orang dokter dan 2 orang Nakes yang memiliki kopentensi dan kewenangan, Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas pelayanan persalinan pervaginam	Kasus	1.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		normal ditolong oleh tim 1 orang dokter dan 2 orang Nakes		
2	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	persalinan pervaginam normal ditolong oleh 2 orang Nakes yang memiliki kopentensi dan kewenangan, Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas pelayanan persalinan pervaginam normal ditolong oleh 2 orang Nakes	Kasus	800.000
3	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergency di PKM PONED untuk lama perawatan 2 hari Spesifikasi: Pembayaran untuk Puskesmas Atas pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency di PKM PONED untuk lama perawatan 2 hari	Kasus	1.250.000
4	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergency di PKM PONED untuk lama perawatan 3 hari Spesifikasi: Pembayaran untuk Puskesmas Atas pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency di PKM PONED untuk lama perawatan 3 hari	Kasus	1.500.000
5	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Belanja Tenaga Kesehatan. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED. Spesifikasi : pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED	Kasus	180.000
6	Jasa Tenaga Kesehatan	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC). Spesifikasi :	Kasus	40.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Dana Non Kapitasi)	pembayaran untuk Puskesmas atas pelayanan Pemeriksaan Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)		
7	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Pemasangan/pencabutan implant/AKDR Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas Pelayanan pemasangan/pencabutan implant/IUD	Kasus	105.000
8	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Pelayanan Suntik KB. Spesifikasi : pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan suntik KB	Kasus	20.000
9	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kehamilan. Spesifikasi : pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan	Kasus	180.000
10	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Ambulan Rujukan Puskesmas (Non Kapitasi) Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas Pelayanan Ambulan Rujukan (untuk Puskesmas selain Ciwandan dan Pulomerak)	Kasus	150.000
11	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Belanja premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Peserta PBU dan BP Premi Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD II (PD Pemda)	Kasus	35.000
12	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Belanja premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Bantuan Iuran atas PBU dan BP Premi Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD II (PD Pemda)	Kasus	2.800
13	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Ambulan Rujukan Puskesmas (Non Kapitasi); Pembayaran untuk Puskesmas Atas Pelayanan Ambulan Rujukan (untuk Puskesmas Ciwandan dan Pulomerak)	Kasus	200.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Pemeriksaan ANC Dilakukan oleh Dokter disertai Pelayanan USG	Kasus	140.000
15	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan. Spesifikasi : Pemeriksaan ANC dilakukan oleh Dokter Spesifikasi : Pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan pemeriksaan ANC dilakukan oleh Dokter	Kasus	80.000
16	Jasa Tenaga Kesehatan	Konsultasi Dokter Spesialis Paru	Orang / Kegiatan	2.000.000
17	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Honorarium Petugas Medis pada Hari Lebaran dan Natarau (Natal & Tahun Baru), Penanggulangan Bencana dan KLB / Tim Reaksi	Shift	250.000
18	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Honorarium Petugas Nonmedis pada Hari Lebaran dan Natarau (Natal & Tahun Baru), Penanggulangan Bencana dan KLB / Tim Reaksi	Shift	150.000
19	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Honorarium Petugas Paramedis pada Hari Lebaran dan Natarau (Natal & Tahun Baru), Penanggulangan Bencana dan KLB / Tim Reaksi	Shift	200.000
20	Tenaga Kesehatan	Psikolog (UPTD PPA)	Orang / Bulan	3.000.000
21	Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter (Banten - Jakarta)	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	400.000
22	Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter (Luar Banten - Jakarta)	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	450.000
23	Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter (Kota Serang)	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	200.000
24	Jasa Tenaga Kesehatan - Perawat / Bidan	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	350.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Banten - Jakarta)			
25	Jasa Tenaga Kesehatan - Perawat / Bidan (Luar Banten - Jakarta)	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	400.000
26	Jasa Tenaga Kesehatan - Perawat / Bidan (Kota Serang)	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	150.000
27	Jasa Tenaga Pengemudi (Banten - Jakarta)	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	250.000
28	Jasa Tenaga Pengemudi (Luar Banten - Jakarta)	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	350.000
29	Jasa Tenaga Pengemudi (Kota Serang)	Kegiatan Rujukan / Ambulan & Mobil Jenazah Gratis	Kegiatan	100.000
30	Jasa Tenaga Kesehatan	Konsultasi Dokter Spesialis Jiwa	Orang / Kegiatan	2.000.000
31	Jasa Tenaga Kesehatan	Konsultasi Dokter Spesialis Patologi Klinik	Orang / Bulan	10.000.000
32	Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas medis Nataru, lebaran, penanggulangan KLB, Tim Reakis Cepat, atau Tim Darurat Medis	shift	250.000
33	Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Para Medis Nataru, lebaran, penanggulangan KLB, Tim Reakis Cepat, atau Tim Darurat Medis	shift	200.000
34	Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas non Medis Nataru, lebaran, penanggulangan KLB, Tim Reakis Cepat, atau Tim Darurat Medis	Shift	150.000
35	Jasa Tenaga Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan. Spesifikasi : Pemeriksaan ANC dilakukan oleh Bidan Spesifikasi : Pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan pemeriksaan ANC dilakukan oleh Bidan	Kasus	60.000

Tabel 72.2  
Update Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Puskesmas Cilegon	Tahun	617.771.258
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Puskesmas Cibeber	Tahun	1.043.070.000
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Puskesmas Purwakarta	Tahun	550.321.248
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Puskesmas Citangkil	Tahun	872.498.812
8	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Puskesmas Pulomerak	Tahun	933.454.999

Tabel 72.3  
Update Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Jasa Pelayanan Non ASN Puskesmas Gerogol	Tahun	97.506.020
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN Puskesmas Jombang	Tahun	120.000.000
3	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN Puskesmas Cilegon	Tahun	154.354.252
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN Puskesmas Cibeber	Tahun	219.298.139
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN Puskesmas Purwakarta	Tahun	44.000.000
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN Puskesmas Citangkil	Tahun	90.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN Puskesmas Citangkil II	Tahun	90.837.210
8	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN Puskesmas Pulomerak	Tahun	233.363.750

Tabel 72.3  
Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN alokasi DAK

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	- Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Citangkil ( DAK )	Tahun	84.750.000
2	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	- Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Cibeber ( DAK )	Tahun	101.500.000
3	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	- Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Cilegon ( DAK )	Tahun	91.200.000
4	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	- Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Citangkil II ( DAK )	Tahun	87.400.000
5	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	- Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Ciwandan ( DAK )	Tahun	108.840.000
6	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	- Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Grogol ( DAK )	Tahun	96.800.000
7	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	- Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Jombang ( DAK )	Tahun	96.400.000
8	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	- Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Pulomerak ( DAK )	Tahun	99.400.000
9	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Insentif UKM Bagi ASN UPTD Puskesmas Purwakarta ( DAK )	Tahun	90.830.000



b. Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat

Tabel 73.1

Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Belanja pelayanan kesehatan dengan kasus KIPPI dengan gejala sedang sampai dengan berat	Kasus	7.000.000
2	Honor Kader Kesehatan	Honor Kader Kesehatan	Bulan	300.000

c. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, Kontribusi Jamian Kesehatan dan Uang Harian

Tabel 73.2

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Kader Integrasi Pelayanan Primer di Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu	Orang / Bulan	1.200.000
2	.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 Jam)	Banten (Cilegon) - Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Orang / Kegiatan	50.000
3	Kontribusi Jaminan Kesehatan	Premi Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD II	Orang	37.800

d. Honorarium Tim Audit Stunting Kota Cilegon

Tabel 74

Honorarium Tim Audit Stunting

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Pakar Audit Kasus Stunting; Dokter Spesialis Anak. Dokter Spesialis Kandungan. Psikolog dan Ahli Gizi	Orang / Kegiatan	3.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Dokter Koordinator Puskesmas	Orang / Kegiatan	600.000
3	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Ahli Gizi Puskesmas	Orang / Kegiatan	500.000
4	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Kepala Puskesmas	Orang / Kegiatan	600.000
5	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Bidan	Orang / Kegiatan	500.000
6	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	PLKB / PKB	Orang / Kegiatan	300.000
7	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Petugas Gizi Rumah Sakit	Orang / Kegiatan	500.000
8	Tim Monitoring dan Evaluasi	Tim Monev DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)	Orang / Kegiatan	500.000

Catatan : honorarium penanganan stunting terdapat juga pada DP3AKB.

- e. Beban Belanja Jasa Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum, Jasa Audit/Survailance ISO dan Pemliharan Bidang Kesehatan

Tabel 75  
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jasa Audit/Surveillance ISO	- Tarif Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan Pratama (DAK)	Kegiatan	9.900.000
2	Beban Tagihan Telepon	Sewa Call center 119 SPGDT	Bulan	12.961.750
3	Biaya Pengiriman	- Biaya pengiriman pemeriksaan sampel SHK ke lab rujukan	Kali	20.000
4	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	(IPAL)	Triwulan	3.550.000
5	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Spectrophotometer UV-Vis (Cek Cuvet, Lampu Tungstan, Test Tube Holder, LCD)	Unit	10.000.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Fume Hood (Lamp Fluorecent 2x 40 watt, Blower, Water supply, ON/OFF )	Unit	10.000.000
7	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Laminar Air Flow (Hepa Filter, Holder Window, Elektronik Socket, Display Monitor, Key star/Power Lock)	Unit	10.000.000
8	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Bio Safety Cabinet (Motor Blower, Lamp UV, Exhaust Air Outlet, Socket)	Unit	10.000.000
9	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Oven / Autoclave (Control/Cockpit, ON/Off Switch, Door Handle, Power Supply)	Unit	10.000.000
10	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Inkubator (Control/Cockpit, ON/Off Switch Door Handle, Power Supply)	Unit	10.000.000
11	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	PH Meter / Multi parameter (LCD Display, Electroda pH, Electroda Coductivity)	Unit	10.000.000
12	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Colorimeter (LCD , Cuvet)	Unit	10.000.000
13	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Neraca (Polarise LCD, IC driver Load Cell)	Unit	5.000.000
14	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Refrigerator (Filter, Isi Freon, Flushing, Sensor Temperatur )	Unit	10.000.000
15	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Microscope (Pemeriksaan Lampu, Lensa, Mikrometer, Makrometer, Lensa Okuler, Control ON dan OFF)	Unit	3.000.000
16	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Turbidimeter (Display, Electronic Control set)	Unit	3.000.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
17	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Buret Digital (Display, Electronic Control Set)	Unit	5.000.000
18	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Rotator (Pemeriksaan Plate Shaker, Timer Knob, Speed Knob, Control ON dan OFF)	Unit	3.000.000
19	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Centrifuge (Pemeriksaan Rotator, Timer Knob, Speed Knob, Control ON dan OFF)	Unit	3.000.000
20	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Urine Analyzer (Pemeriksaan Control ON dan OFF, Loading Platform, Printer bot, Display, Electronic Module)	Unit	10.000.000
21	Pemeliharaan dan Service Alat Laboratorium Umum	Photometer (Pemeriksaan Control ON dan OFF, Selang/hose peristaltik/aspirator, Cuvet, Lampu, Printer)	Unit	10.000.000
22	Pemeliharaan Server	Jasa Perawatan Server	Bulan	5.000.000

f. Biaya Sewa Sistem Aplikasi terkait Kesehatan

Tabel 76.1

Sewa Sistem Bidang Kesehatan

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Sewa Sistem	Sistem Aplikasi ePuskesmas untuk dalam gedung	Bulan	555.000
2	Sewa Sistem	Sistem Aplikasi ePuskesmas untuk Dalam Gedung dan Luar Gedung seperti Posbindu, Poskesdes, Pustu, Polindes, eFramasi	Bulan	1.110.000
3	Sewa Sistem	Sistem Aplikasi eFarmasi	Bulan	2.775.000

4	Vaksin Data Loger	Managed service untuk vaksin data loger monitoring Internet dan pemeliharaan untuk alat ukur pemantauan suhu vaksin	Bulan	222.000
5	Sewa Sistem	- Sistem Aplikasi e-Labkesda	Bulan	555.000
6	Sewa Sistem	- Sistem Informasi kesehatan Terintegrasi RME / SIM Labkesda / E-Labkesda	Bulan	1.110.000

g. Jasa Pemeriksaan Laboratorium

Tabel 76.2  
Beban Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi, Tingkat Kemurnian (DAK) dan Jasa Pemeriksaan Laboratorium khusus di Dinas Kesehatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	E.Coli	Per Sampel	125.000
2	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Total Coliform	Per Sampel	125.000
3	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Flourida	Per Sampel	51.000
4	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Kromium Valensi 6	Per Sampel	40.000
5	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Kadmium	Per Sampel	120.000
6	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Nitrit	Per Sampel	28.000
7	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Nitrat	Per Sampel	56.000
8	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Bau	Per Sampel	7.000
9	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Warna	Per Sampel	14.000
10	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	TDS	Per Sampel	14.000
11	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Kekeruhan	Per Sampel	14.000
12	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Suhu	Per Sampel	7.000
13	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Aluminium	Per Sampel	57.000
14	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Besi	Per Sampel	40.000
15	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Mangan	Per Sampel	39.000
16	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	pH	Per Sampel	24.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Timbal	Per Sampel	110.000
18	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Total Klorin	Per Sampel	27.000
19	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Arsen	Per Sampel	110.000
20	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Bakteri (Escherichia Coli) (DAK)	Sampel	560.000
21	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Bakteri (Salmonella) (DAK)	Sampel	898.850
22	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia (Identifikasi Formalin) (DAK)	Sampel	560.000
23	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia (Identifikasi Boraks) (DAK)	Sampel	560.000
24	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia Pewarna (Identifikasi Pewarna yang diuji sesuai dengan pewarna pada produk) (DAK)	Sampel	672.000
25	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia Pemanis (Identifikasi Pemanis yang diuji sesuai dugaan pemanis pada produk) ( DAK )	Sampel	672.000
26	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia Aflatoksin B1 ( DAK )	Sampel	952.000
27	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2) ( DAK )	Sampel	2.800.000
28	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Kapang dan khamir ( DAK )	Sampel	616.000
29	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia (PK Siklamat) (DAK)	Sampel	672.000
30	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia (Benzoat) (DAK)	Sampel	672.000
31	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia (PK Nitrit) (DAK)	Sampel	896.000
32	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia (PK Sulfit) (DAK)	Sampel	896.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Pengujian Kimia (PK Cemar Pb) (DAK)	Sampel	896.000
34	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia Cemar Cd ( DAK )	Sampel	896.000
45	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia Cemar Hg ( DAK )	Sampel	896.000
36	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Pengujian Kimia (pH) (DAK)	Sampel	280.000
37	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	- Pengujian Kimia (Cemar As) (DAK)	Sampel	896.000

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat dan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium.

Tabel 77  
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Dara dan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perbaikan Alat Berat - Compacting Equipment	Perbaikan Ringan	Unit	20.000.000
2	Perbaikan Alat Berat - Compacting Equipment	Perbaikan Sedang	Unit	60.000.000
3	Pemeliharaan Alat Berat - Compacting Equipment	Pemeliharaan Rutin	Unit	5.000.000
4	Pemeliharaan Alat Berat - Compacting Equipment	Pemeliharaan Berkala	Unit	10.000.000
5	Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium	Concrete Compressive Strength	Unit	2.000.000
6	Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium	Concrete Test Hammer Digital	Unit	500.000
7	Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium	Core Drilling Machine	Unit	1.000.000
8	Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium	Sondir (Dutch Cone Penetrometer)	Unit	3.750.000

5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Beban Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

Tabel 78

Beban Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya, dan Beban Sewa Tanaman

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Pilar / Tugu / Tanda Lainnya	Markah Cilegon Baru	Tahun	512.439.800

6. DINAS SOSIAL

a. Honorarium Tenaga di Bidang Penanganan Sosial, diberikan kepada:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial meliputi Petugas Layanan Data dan Pengaduan Dinas Sosial, Petugas Rumah Singgah.
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TRC) meliputi Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial (LK3) meliputi Pekerja Sosial pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
4. Tenaga Relawan Taruna Siaga Bencana (TALI ASIH).
5. Biaya Operasional Pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana, dan Biaya Jasa Penanganan Sosial.
6. Biaya Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan / Pengobatan / Perawatan.
7. Honorarium Operator dan Pendamping JSCB meliputi Operator dan Pendamping.
8. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
9. Pengurus dan Tenaga Profesional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) meliputi Ketua LK3, Pekerja Sosial LK3, Relawan Sosial LK3, Psikolog LK3, dan Sekretaris LK3.

Tabel 80

Honorarium Tenaga di Bidang Penanganan Sosial

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Petugas Layanan Data dan Pengaduan Dinas Sosial	Orang / Bulan	2.600.000
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Petugas Rumah Singgah	Orang / Bulan	2.600.000



No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TRC)	Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial	Orang / Bulan	2.600.000
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial (LK3)	Pekerja Sosial pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Orang / Bulan	300.000
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang / Bulan	1.000.000
6	Pengurus dan Tenaga Profesional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Ketua LK3	Orang / Bulan	400.000
7	Pengurus dan Tenaga Profesional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sekretaris LK3	Orang / Bulan	200.000
8	Pengurus dan Tenaga Profesional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Relawan Sosial LK3	Orang / Bulan	200.000
9	Pengurus dan Tenaga Profesional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Psikolog LK3	Orang / Bulan	3.000.000
10	Tenaga Relawan Taruna Siaga Bencana (TALI ASIH)	TAGANA Tali Asih	Orang / Bulan	100.000
11	Biaya Operasional Pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana	Uang Harian Petugas Distribusi Penyediaan Makanan, Petugas Dapur Umum, Petugas Pelayanan Dukungan Psikososial, Petugas Monitoring TAGANA	Orang / Kali	150.000
12	Biaya Jasa Penanganan Sosial	Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Orang / Bulan	1.190.000
13	Biaya Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan/Pengobatan/Perawatan	Untuk Orang Terlantar Sakit	Orang / Kali	10.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Honorarium Operator dan Pendamping JSCB	Operator Program Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (JSCB)	Orang / Bulan	2.500.000
15	Honorarium Operator dan Pendamping JSCB	Pendamping Program Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (JSCB)	Orang / Bulan	2.500.000

b. Belanja Pembayaran Biaya Layanan Social Fund Transfer (SFT)

Tabel 81

Biaya Layanan Sosial

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya layanan Sosial	Biaya layanan Social Fund Transfer (SFT) Bansos	KPM	5.000

c. Upah Tenaga Pemulasaraan Jenazah/Tenaga Gali Kubur

Tabel 82

Jasa Tenaga Penanganan Sosial (Upah Tenaga Pemulasaraan)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
Belanja jasa tenaga penanganan sosial	Tenaga pemulasaraan jenazah/tenaga gali kubur	orang/kali	250.000

7. DINAS TENAGA KERJA

a. Sewa Lahan / Tanah

Tabel 83

Beban Sewa Tanah Non Persil Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Lahan / Tanah	Lahan Untuk Pelatihan Alat Berat	Bulan	5.000.000

b. Biaya Transprtasi danAkomodasi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Uang Saku Peserta Pelatihan

Tabel 84

Biaya Transprtasi danAkomodasi Calon Pekerja MIgran Indonesia dan Uang Saku Peserta Pelatihan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transportasi dan Akomodasi Calon Pekerja Migran Indonesia	Bantuan Transportasi dan Akomodasi Calon Pekerja Migran Indonesia	Orang	500.000
2	Uang Saku Peserta Pelatihan	Peserta Pelatihan BLK	Orang	25.000

8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Beban penanganan dampak sosial kemasyarakatan, honor Tim Audite Stunting,

Tabel 85

Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Pengganti Tidak Bekerja Peserta KB MOW dan MOP	Orang	450.000
2	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Pakar Audit Kasus Stunting; Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Kandungan, Psikolog dan Ahli Gizi	Orang / Kegiatan	3.000.000
3	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Dokter Koordinator Puskesmas	Orang / Kegiatan	600.000
4	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Ahli Gizi Puskesmas	Orang / Kegiatan	500.000
5	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Kepala Puskesmas	Orang / Kegiatan	600.000
6	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Bidan	Orang / Kegiatan	500.000
7	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	PLKB / PKB	Orang / Kegiatan	300.000
8	Tim Audit Stunting Kota Cilegon	Petugas Gizi Rumah Sakit	Orang / Kegiatan	500.000
9	Tim Monitoring dan Evaluasi	Tim Monev DASHAT	Orang / Kegiatan	500.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Honorarium Advokad	Advokad (UPTD PPA)	Orang / Bulan	3.000.000
11	Honorarium Penyuluh Pendampingan	KIE oleh Kader PPKDB	Orang / Bulan	150.000
12	Honorarium Penyuluh Pendampingan	Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) Kader Cilegon Mandiri	Orang / Bulan	300.000
13	Honorarium Penyuluh Pendampingan	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Group	330.000
14	Penyuluh atau Pendampingan	Relawan Home Visit Non Pegawai Pemerintah Kota Cilegon	Orang / Hari	225.000
15	Tenaga Penyuluh atau Pendampingan KB IUD	- Diberikan kepada 1 Orang Kader / Babinsa / Babinpotdirga / Babinpotmar / Babinkamtibmas yang dilengkapi surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan IUD	Orang	10.000
16	Tenaga Penyuluh atau Pendampingan KB Implan	- Diberikan kepada 1 Orang Kader / Babinsa / Babinpotdirga / Babinpotmar / Babinkamtibmas yang dilengkapi surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB Implan	Orang	9.000
17	Tenaga Penyuluh atau Pendampingan KB MOW	- Diberikan kepada 1 Orang Kader / Babinsa / Babinpotdirga / Babinpotmar / Babinkamtibmas yang dilengkapi surat tugas dan melakukan pendampingan kepada	Orang	40.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB MOW		
18	Tenaga Penyuluh atau Pendampingan KB MOP	- Diberikan kepada 1 Orang Kader / Babinsa / Babinpotdirga / Babinpotmar / Babinkamtibmas yang dilengkapi surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB MOP	Orang	50.000
19	Honorarium Rohaniawan	Rohaniawan (UPTD PPA)	Orang / Bulan	2.000.000
20	Jasa Tenaga Kesehatan	Psikolog (UPTD PPA)	Orang / Bulan	3.000.000
21	Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan KB MOW	Kasus	5.500.000
22	Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter Spesialis Urologi	Pelayanan KB MOP	Kasus	400.000
23	Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan KB MOW	Kasus	2.000.000
24	Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan KB IUD Implan dan Cabut Implan	Kasus	100.000
25	Jasa Tenaga Kesehatan	- Pelayanan KB MOW	Kasus	3.500.000

b. Honorarium PKK Tingkat Kota dan Dharma Wanita Persatuan

Honorarium PKK tingkat kota dan Darma Wanita Persatuan diberikan kepada:

1. Tim Penggerak PKK tingkat Kota Cilegon; dan
2. Pengurus Darma Wanita Persatuan.

Tabel 86

Honorarium PKK Tingkat Kota dan DPWP dan Beban Jasa yang  
Diberikan kepada Masyarakat

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium PKK Tingkat Kota dan DPWP	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan	Orang /bulan	350.000

		DPWP - Anggota PKK		
2	Honorarium PKK Tingkat Kota dan DPWP	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Sekretaris PKK	orang/bulan	600.000
3	Honorarium PKK Tingkat Kota dan DPWP	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - ketua PKK	Orang / Bulan	1.000.000
4	Honorarium PKK Tingkat Kota dan DPWP	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Pengurus PKK	Orang / Bulan	500.000
5	Honorarium PKK Tingkat Kota dan DPWP	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Ketua DWP	Orang / Bulan	750.000
6	Honorarium PKK Tingkat Kota dan DPWP	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Pengurus DWP	Orang / Bulan	300.000
7	Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat	Biaya Rawat Inap Korban Kekerasan	Orang	9.000.000
8	Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat	Biaya Rawat Jalan Korban Kekerasan	Orang	800.000
9	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Upah Juru Masak	Per Bulan	300.000

9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- a. Jasa Pengolahan, Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah dan  
Jasa Analisa Lingkungan, dan Jasa Pengujian dan Analisa  
Komposisi dan Tingkat Kemurnian

Tabel 87

Jasa Pengolahan, Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah, Jasa  
Analisa dan Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat  
Kemurnian

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Jasa Pengolahan, Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah	Pengangkutan, Pemusnahan / Pengolahan Limbah B3 Padat / Cair termasuk Limbah Medis (Infeksius) Laboratorium	Kg	10.000

2	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Biaya Analisa Air Limbah Domestik	Per Sampel	4.166.878
3	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Biaya Analisa Air Limbah Industri	Per Sampel	6.728.236
4	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Biaya Analisa Air Permukaan	Per Sampel	4.166.878
5	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Biaya Analisa Air Limbah TPSA	Per Sampel	4.106.097
6	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Biaya Analisis Sumber Emisi Tidak Bergerak	Per Sampel	5.004.515
7	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Biaya Analisis Kualitas Udara Ambien	Per Sampel	5.181.476
8	Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan	Pengujian Air Permukaan dalam Kondisi Darurat	Per Sampel	9.000.000
9	Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan	Pengujian Udara Ambien dalam Kondisi Darurat	Per Sampel	8.800.000
10	Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan	Pengujian Udara Emisi dalam Kondisi Darurat	Per Sampel	8.800.000

b. Beban Pemeliharaan Mesin, Alat Laboratorium dan Komputer

Tabel 88

Pemeliharaan Mesin Alat Laboratorium dan Komputer

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeliharaan Mesin BBJP	- Mesin Pencacah Kasar No.1 ; Berdasarkan Surat dan RAB No. 900.1/974/Sekrt Dinas Lingkungan Hidup	Tahun	46.398.000
2	Pemeliharaan Mesin BBJP	- Mesin Pencacah Kasar No.4 ; Berdasarkan Surat dan RAB No. 900.1/974/Sekrt Dinas Lingkungan Hidup	Tahun	53.418.750
3	Pemeliharaan Mesin BBJP	- Mesin Pencacah Halus No.2 ; Berdasarkan Surat dan RAB No.	Tahun	46.786.500

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		900.1/974/Sekrt Dinas Lingkungan Hidup		
4	Pemeliharaan Mesin BBJP	- Mesin Pencacah Halus No.3 ; Berdasarkan Surat dan RAB No. 900.1/974/Sekrt Dinas Lingkungan Hidup	Tahun	60.483.900
5	Pemeliharaan Mesin BBJP	- Mesin Conveyor Pemilahan ; Berdasarkan Surat dan RAB No. 900.1/974/Sekrt Dinas Lingkungan Hidup	Tahun	17.121.750
6	Pemeliharaan Mesin BBJP	- Mesin Conveyor Mesin Cacah ; Berdasarkan Surat dan RAB No. 900.1/974/Sekrt Dinas Lingkungan Hidup	Tahun	15.695.400
7	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium – Unit Alat Laboratorium – Unit Laboratorium Lainnya ISPU	Jasa Perawatan Berkala ISPU	Unit	10.500.000
8	Beban Pemeliharaan Komputer – Peralatan Komputer – Peralatan Jaringan ISPU	Pemeliharaan Komputer dan Jaringan ISPU	Unit	1.890.000

10. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN

a. Beban Sewa Peralatan Jaringan

Tabel 89

Beban Sewa Peralatan Jaringan Sewa Virtual Private Server (VPS)

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Virtual Private Server (VPS)	Ram 4 GB. CPU 4 cores. SSD 70 GB	Tahun	4.128.000
2	Sewa Virtual Private Server (VPS)	Ram 8 GB. CPU 8 cores. SSD 120 GB	Tahun	9.000.000



3	Sewa Virtual Private Server (VPS)	Ram 16 GB. CPU 16 cores. SSD 200 GB	Tahun	17.400.000
4	Sewa Virtual Private Server (VPS)	Ram 32 GB. CPU 32 cores. SSD 320 GB	Tahun	26.880.000

11. DINAS PERHUBUNGAN

- a. Beban Pemeliharaan Software, Honor Penjaga Jalan Lalu Lintas dan Beban Jasa Tagihan Telepon pada Dinas Perhubungan

Tabel 90  
Beban Pemeliharaan Software, Honor Penjaga Jalan Lalu Lintas dan Beban Jasa Tagihan Telepon

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeliharaan Software SIM PKB Pengujian Kendaraan Bermotor.	Sepesifikasi : Servis Clude, Hosting Webserver dan SMS Gateway	Bulan	1.500.000
2	Pemeliharaan Software SIM PKB Pengujian Kendaraan Bermotor;	Sepesifikasi Technical Support	Bulan	1.500.000
3	Honorarium Penjaga Jalan Lintasan (PJL)	Petugas Palang Pintu Kereta Api	Orang / Bulan	3.500.000
4	Beban Tagihan Telepon	SMS Center PJU	Tahun	1.800.000

12. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- A. Biaya Registrasi dan Sertifikasi

Tabel 91  
Biaya Resgistrasi dan Sertifikasi / Perizinan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Registrasi dan Sertifikasi	Sertifikat Halal UMKM	Sertifikat	5.000.000
2	Biaya Registrasi dan Sertifikasi	Sertifikat Halal Luar Negeri	Sertifikat	800.000
3	Biaya Registrasi dan Sertifikasi	Permohonan Sertifikat dan Perpanjangan Sertifikat Halal	Sertifikat	300.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Biaya Registrasi dan Sertifikasi	Permohonan HAKI Merk secara Elektronik / Online	Pemohon	500.000

B. Honorarium Pendamping Keg DPWKEL, Penceramah Pelatihan dan Taransportasi Narasumber Periha Alokasi DAK

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAK Honorarium Penceramah Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000
2	DAK Honorarium Narasumber Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000
3	DAK Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Jam Pelajaran	300.000
4	Honorarium Pendamping - DPWKEL	Pendamping UMKM - DPWKEL - Tk. Kelurahan	Orang / Bulan	1.000.000
5	DAK Biaya Tagihan Internet Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Bulan	515.000
6	DAK Sewa Server / Peladen (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Paket	2.610.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	DAK Jasa Aplikasi Elektronik (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Paket	3.175.000
8	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Pengujian Masa Simpan Produk Pangan	Sampel	6.600.000
9	Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	Sertifikasi Izin Edar Pangan Olahan (BPOM)	Kegiatan	7.000.000
10	DAK Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Hari	350.000
11	DAK Uang Harian Peserta Pelatihan Luring (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Hari	100.000
12	DAK Transportasi Peserta Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Kali	150.000
13	DAK Transportasi Penceramah Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Kali	150.000
14	DAK Transportasi Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Kali	150.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	DAK Transportasi Narasumber Pelatihan (DINKOP-UMKM)	- Berdasarkan KEPMENKOP-UKM No. 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tertinggi Dana Alokasi Khusus Non Fisik DINKOP-UMKM;	Orang / Kali	150.000

13. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

a. Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

Tabel 92

Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi \_ Honorarium Petugas  
Pengelolaan Radio

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
1	Honorarium Petugas Pengelolaan Radio - Direktur	Orang / Bulan	3.000.000
2	Honorarium Petugas Pengelolaan Radio - Dewan Pengawas Unsur Profesional	Orang / Bulan	2.500.000
3	Honorarium Petugas Pengelolaan Radio - Dewan Pengawas Unsur Masyarakat	Orang / Bulan	2.500.000
4	Honorarium Petugas Pengelolaan Radio - Dewan Pengawas Unsur Pemerintah Daerah	Orang / Bulan	2.500.000
5	Honorarium Petugas Pengelolaan Radio - Penyiar Radio	Orang / Jam	45.000
6	Honorarium Petugas Pengelolaan Radio-Direktur	Orang / Bulan	6.500.000
7	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi. Spesifikasi : Wartawan lokal dan Nasional Peliput Berita / Even Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Per Liputan	100.000

b. Perizinan Radio, Jaringan, Pemeliharaan, Sewa dan Internet

Tabel 93

Perizinan Radio, Jaringan, Pemeliharaan, Sewa dan Internet

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perizinan	Perizinan IPP Radio	Tahun	3.000.000
2	Perizinan	Perizinan ISR Radio	Tahun	3.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Sewa Peralatan Jaringan	Lisensi Firewall Fortiget	Tahun	85.000.000
4	Sewa SSL Email	SSL Email Pemerintah Kota Cilegon	Domain	16.650
5	Sewa Aset Tidak Berwujud - Software	Software Intelligence Media Analytics (IMA)	Bulan	15.000.000
6	Sewa SSL	Pemasangan Baru dan Perpanjangan SSL Domain, Sub Domain Website dan Aplikasi	Domain	200.000
7	Pemeliharaan Peralatan Pemancar	- Pemeliharaan Menara Antena Tower Triangle	Kegiatan	8.500.000
8	Beban Tagihan Telepon	Sewa Call Center 112	Bulan	16.500.000

14. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat perihal Dekranasda Kota Cilegon dan Desain Industri.

Tabel 94

Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat perihal Dekranasda dan Desain Industri

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dekranasda Kota Cilegon	Ketua Dekranasda	Bulan	750.000
2	Dekranasda Kota Cilegon	Pengurus Dekranasda	Bulan	500.000
3	Dekranasda Kota Cilegon	Penjaga Galeri Dekranasda Kota Cilegon	Orang / Bulan	2.500.000
4	Desain Industri	Desain Industri (pendaftaran secara elektronik/ online)	Permohonan	250.000

15. SEKRETARIAT DAERAH

a. Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Tabel 95

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain	Orang / Kegiatan	1.800.000
2	Honorarium Beracara	Diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain	Orang / Kegiatan	1.800.000
3	Biaya Bantuan Hukum Litigasi Perkara Pidana/Perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara	Tahap Penyidikan/Tahap Gugatan/Tahap Pendahuluan	Kasus	2.000.000
4	Biaya Bantuan Hukum Litigasi Perkara Pidana/Perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Kasus	3.000.000
5	Biaya Bantuan Hukum Litigasi Perkara Pidana/Perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara	Tahap Banding	Kasus	1.000.000
6	Biaya Bantuan Hukum Litigasi Perkara Pidana/Perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara	Tahap Kasasi	Kasus	1.000.000
7	Biaya Bantuan Hukum Litigasi Perkara Pidana/Perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara	Tahap Peninjauan Kembali	Kasus	1.000.000
8	Honorarium Advokad	Advokad (UPTD PPA)	Orang / Bulan	3.000.000

b. Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Satuan biaya Petugas Tim Petugas Haji Daerah (TPHD), dan Pelayanan lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cilegon.

Tabel 96

Biaya Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Pelayanan Rumah Tangga, Keamanan, dan Akomodasi Haji

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Penaik Turun Barang Jamaah Haji	Orang	500.000
2	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Rekayasa Cuaca	Orang	1.500.000
3	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Seksi Konsumsi	Orang	300.000
4	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Piket Bandara Kemenag	Orang	1.000.000
5	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas TPHD	Orang	110.000.000
6	Tenaga Pelayanan Umum - Asisten Rumah Tangga	Pembantu Rumah Tangga KDH/ WKDH- Asisten Rumah Tangga	Orang / Bulan	1.750.000
7	Tenaga Pelayanan Umum - Asisten Rumah Tangga	TPP Pembantu Rumah Tangga- Asisten Rumah Tangga	Orang / Bulan	750.000
8				
9	Jasa Pengharum Ruangan Ecocare	Jasa Pengharum Ruangan Ecocare	Tahun	100.000.000
10	Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Pengawal Dalam Bus Jamaah Haji	Orang	750.000
11	Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Patwal Polisi	Orang	1.000.000
12	Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Pengamanan Polres / Pol PP / Lalu Lintas Dishub	Orang	100.000
13	Jasa Tenaga Keamanan	- Pengamanan dan Pengawal Pribadi Walikota dan Wakil Walikota; Unsur Kepolisian	Orang / Bulan	4.400.000
14	Transportasi dan Akomodasi Calon Jamaah Haji	Bantuan Transportasi dan Akomodasi Calon Jamaah Haji	Orang	500.000

c. Jasa Kontribusi Asosiasi

- Jasa Kontribusi Asosiasi antar Pemerintah Daerah (Kota/kabupaten)

Tabel 97

Jasa Kontribusi Asosiasi antar Pemerintah Daerah (Kota/kabupaten)

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
----	--------	-------------	--------	---------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Iuran Keanggotaan APEKSI	Jasa Iuran Keanggotaan Komwil III APEKSI	Tahun	15.000.000
2	Iuran Keanggotaan APEKSI	Jasa Iuran Wajib Anggota APEKSI	Tahun	75.000.000
3	Iuran Keanggotaan AKKOPSI	Iuran Keanggotaan AKKOPSI	Tahun	10.000.000

d. Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Berat

Tabel 98

Pemeliharaan Alat Berat Elevator

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Alat Pengangkat : Pemeliharaan Elevator	Lift	Unit / Bulan	3.000.000

e. Tim Penyusun Sambutan KDH - ProKoPim

Tabel 99

Tim Penyusun Sambutan KDH

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tim Penyusun Sambutan KDH - ProKoPim	Penanggung Jawab	Eksemplar	450.000
2	Tim Penyusun Sambutan KDH - ProKoPim	Redaktur	Eksemplar	400.000
3	Tim Penyusun Sambutan KDH - ProKoPim	Penyusun Naskah	Eksemplar	200.000

f. Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar, Penyelenggaraan acara

Tabel 100

Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar, penyelenggaraan,

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Inspektur Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Perwira Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000



Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Cadangan Perwira Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Komandan Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Cadangan Komandan Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Komandan Pasukan	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Komandan Kompi Pasukan	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Kompi Paskibra	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pam Inspektur Upacara	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Penanggung Jawab Pawai	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pengatur Barisan	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	300.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pembaca Teks / Naskah	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	400.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pembawa Pataka / Obor	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	400.000

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pembawa Acara / MC	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Pembaca Doa	Unsur Tokoh Ulama / MUI / Kemenag	Orang / Kegiatan	500.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Operator Lainnya	Unsur TNI/Polri/Sipil Lainnya	Orang / Kegiatan	500.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Juri dan Komentator	Unsur yang Menguasai Bidangnya	Orang / Kegiatan	1.000.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Marching Band / Koorsk Pendukung	Unsur PDBI Kota Cilegon	Orang / Kegiatan	150.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Paduan Suara	Unsur Sipil / Pelajar	Orang / Kegiatan	150.000
Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Besar - Paskibra	Unsur PPI	Orang / Kegiatan	150.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembina Peserta MTQ	Orang	1.700.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Koordinator Pawai Ta'aruf	Orang	500.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Seksi Musabaqoh	Orang	750.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Penerima Tamu	Orang	300.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Tenaga Penyusun Sambutan / Pidato	Orang	300.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Official MTQ Provinsi	Orang	1.200.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Pendamping Qori / Qoriah	Orang	600.000

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	4
Jasa Penyelenggaraan Acara	Peserta MTQ	Orang	2.500.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Sekretariat MTQ Provinsi	Orang	1.200.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Seksi Musabaqoh STQ	Orang / Hari	100.000
Jasa Penyelenggaraan Acara	Event Organizer Kegiatan AKKOPSI	Kegiatan	600.000.000
Beban Tagihan Telepon	Biaya Mobilitas Komunikasi Ajudan Pendamping Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah	Orang / Bulan	2.500.000
Beban Tagihan Telepon	Biaya Mobilitas Komunikasi Sekretaris Daerah	Orang / Bulan	7.000.000
Beban Tagihan Telepon	Biaya Mobilitas Komunikasi Wakil Wali Kota Cilegon	Orang / Bulan	8.000.000
Beban Tagihan Telepon	Biaya Mobilitas Komunikasi Wali Kota Cilegon	Orang / Bulan	10.000.000
Biaya Medical Check Up	Kepala Daerah	Orang	100.000.000
Biaya Medical Check Up	Wakil Kepala Daerah	Orang	60.000.000
Sewa WhatsApp Bot/ Blast	WhatsApp Bot/ Blast Pemerintah Kota Cilegon	Bulan	1.998.000

16. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a. Jasa Kontribusi Asosiasi Adeksi dan Jasa Tenaga Ahli

Tabel 101  
Jasa Kontribusi Asosiasi Adeksi dan Jasa Tenaga Ahli

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kontribusi Asosiasi Adeksi	Iuran Keanggotaan Adeksi	Tahun	40.000.000
2	Iuran Wajib ASDEKSI	Iuran Keanggotaan ASDEKSI	Tahun	1.000.000
3	Jasa Tenaga Ahli	Kelompok Pakar/Tenaga Ahli Pimpinan DPRD/Tenaga Ahli Fraksi	Orang / Bulan	7.000.000

b. Biaya Jasa Tenaga Keamanan

Tabel 102  
Jasa Tenaga Keamanan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Keamanan Sekretariat DPRD	Tahun	3.089.785.458

17. INSPEKTORAT

a. Honorarium Tim Pembina Unit Satuan Tugas Sapu Bersih  
Pungutan Liar

Diberikan kepada : ASN yang melaksanakan tugas fungsi tambahan sebagai Pembina Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Tabel 103

Honorarium Tim Pembina Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

NO	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.500.000,-
2.	Pembina	Orang/Bulan	1.250.000,-
3.	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,-
4.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000,-
5.	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,-
6.	Kepala Bidang	Orang/Bulan	1.000.000,-
7.	Ketua Kelompok Kerja	Orang/Bulan	1.000.000,-
8.	Anggota Kelompok Kerja	Orang/Bulan	750.000,-

b. Uang Harian Perjalanan Dinas (Pembinaan / Pengawasan)

Tabel 104

Uang Harian Perjalanan Dinas (Pembinaan / Pengawasan)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
Uang Harian Perjalanan Dinas (Pembinaan / Pengawasan)	Uang harian perjalanan dinas dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tanpa acuan jarak dan tempat sasaran pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan dan pembinaan	Orang / Hari	200.000

18. KECAMATAN DAN KELURAHAN

a. Honorarium Fasilitator Musrenbang Kelurahan

Tabel 105  
Fasilitator Musrenbang

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fasilitator Musrenbang	Fasilitator Kelurahan/ Kecamatan	Orang / Kegiatan	500.000

b. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Tabel 106  
Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
2	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Anggota	Orang / Bulan	750.000
3	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Sekretaris	Orang / Bulan	500.000

c. Biaya Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  
Honorarium Kader/ Pengurus/ Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan kepada :

- 1) Ketua RT/RW;
- 2) Wakil Ketua RW;
- 3) Sekretaris/Bendahara RT/RW;
- 4) Petugas Linmas.

Tabel 107  
Honorarium Kader/Pengurus/Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketua RT/RW	OB	1.000.000
2	Wakil Ketua RW	OB	300.000
3	Sekretaris/bendahara RT/RW	OB	300.000
4	Petugas Linmas	OB	200.000

d. Honorarium Bidang Keamanan Wilayah

Honorarium Bidang Keamanan Wilayah diberikan kepada :

1. Unsur pelaksanaan Koramil, Pos TNI AL, dan Pos TNI AU yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) di wilayah kelurahan. (Babinsa).
2. Unsur petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat. (Babhinkamtibmas)

Tabel 108

Honorarium Bidang Keamanan Wilayah

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Babinsa dan Babhinkamtibmas	1 Orang Babinsa, 1 Orang Bhabinkamtibmas	Orang/ Bulan	500.000
2	Honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Ketua	Orang / Bulan	250.000
3	Honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Pengurus	Orang / Bulan	150.000

f. Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Honorarium Pendamping – DPWKEL)

Tabel 109

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Pendamping - DPWKEL	Pendamping Sarpraswil - DPWKEL	Orang / Bulan	1.000.000
2	Honorarium Pendamping - DPWKEL	Pendamping UMKM - DPWKEL - Tk. Kota. Kecamatan	Orang / Bulan	1.000.000
3	Honorarium Pendamping - DPWKEL	Pendamping UMKM - DPWKEL - Tk. Kelurahan	Orang / Bulan	500.000
4	Honorarium Penyuluh Pendampingan	KIE oleh Kader PPKDB	Orang / Bulan	150.000
5	Honorarium Penyuluh Pendampingan	Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Orang / Bulan	300.000

		Kader Cilegon Mandiri		
6	Honorarium Penyuluh Pendampingan	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Group	330.000

g. Sarana Prasarana Wilayah

Tabel 110

Sarana Prasarana Wilayah

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
Sarana Prasarana Wilayah	Sarpraswil (SALIRA) Per-RW	Tahun	110.000.000

19. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

A. Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi

Belanja Jasa Konversi Aplikasi SIMRAL diberikan untuk belanja jasa pembangunan Sistem Aplikasi Daerah, Sistem informasi manajemen, Perencanaan penganggaran dan pelaporan.

Table 111

Sistem Informasi Manajemen, Perencanaan Penganggaran Dan Pelaporan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sistem Aplikasi Daerah	Sistem informasi manajemen, Perencanaan penganggaran dan pelaporan	Tahun	195.000.000
2	Sistem Aplikasi Daerah	Sistem informasi manajemen, Perencanaan penganggaran dan pelaporan	Tahun	250.000.000

B. Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Satuan Biaya Jasa Pengelolaan BMD dialokasikan kepada:

- a. Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
  - 1. Honorarium Pengurus Barang Pengguna (OPD/UPB).
  - 2. Honorarium Pengurus Barang Pembantu (OPD/UPB).
  - 3. Honorarium Anggota Tim Pengelolaan BMD (PNS).

4. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD.
5. Honorarium Koordinator Tim Pengelolaan BMD.
6. Honorarium Pengelola BMD.
7. Honorarium Pejabat Penatausahaan BMD.
8. Honorarium Pengurus Barang Pengelola.
9. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
10. Honorarium Pembantu Pengurus Barang (OPD/UPB).
11. Honorarium Pengurus Barang Pembantu (SDN/TKN).

Tabel 112

Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Koordinator Tim Pengelolaan BMD	Orang / Bulan	2.500.000
2	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	Orang / Bulan	3.500.000
3	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Anggota Tim Pengelolaan BMD (Non PNS)	Orang / Bulan	2.000.000
4	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	2.800.000
5	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Anggota Tim Pengelolaan BMD (PNS)	Orang / Bulan	2.500.000
6	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pengelola BMD	Orang / Bulan	3.000.000
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pejabat Penatausahaan BMD	Orang / Bulan	2.900.000
8	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	2.850.000
9	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pengurus Barang Pengguna (OPD/UPB)	Orang / Bulan	800.000



No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pengurus Barang Pembantu (OPD/UPB)	Orang / Bulan	700.000
11	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pengurus Barang Pembantu (SDN/TKN)	Orang / Bulan	500.000
12	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Honorarium Pembantu Pengurus Barang (OPD/UPB)	Orang / Bulan	700.000

C. Belanja Jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa atas pengukuran Tanah.

Tabel 113  
Jasa Pengukuran Tanah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengamanan Tanah	Pengukuran/Splitting (Pemecahan) / Roya Permohonan Hak/Penghapusan Hak/Permohonan Pemeriksaan Tanah/Balik Nama/Pengecekan Sertifikat	Tahun	60.000.000
2	Biaya Sertifikasi Lahan	Pengukuran/Splitting (Pemecahan) / Roya Permohonan Hak/Penghapusan Hak/Permohonan Pemeriksaan Tanah/Balik Nama/Pengecekan Sertifikat	Kegiatan	20.000.000

D. Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Tabel 114

Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Tim Kajian Keberatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah	Anggota; Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 Miliar; PMK No.10/PMK.02/2016	Orang/Bulan	1.100.000
	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah	Sekretariat; Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 Miliar; PMK No.10/PMK.02/2016	Orang/Bulan	800.000
	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah	Sekretaris Merangkap Anggota; Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 Miliar; PMK No.10/PMK.02/2016	Orang/Bulan	1.300.000
	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah	Ketua Merangkap Anggota; Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar; PMK No.10/PMK.02/2016	Orang/Bulan	1.600.000
2	Tim Kajian Keberatan	Ketua Merangkap Anggota; PMK No.10/PMK.02/2016	Orang/Bulan	1.100.000
	Tim Kajian Keberatan	Anggota; PMK No.10/PMK.02/2016	Orang/Bulan	750.000
	Tim Kajian Keberatan	Sekretaris Merangkap Anggota; PMK No.10/PMK.02/2016	Orang/Bulan	800.000

E. Beban Jasa Audit/Surveillance ISO, Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, dan Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus

Tabel 115

Beban Jasa Audit/Surveillance ISO dan Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jasa Audit / Surveillance ISO	- Surveillance ISO 9001 : 2015	Kegiatan	69.153.000
2	Sistem Aplikasi Daerah	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	Tahun	195.000.000
3	Sistem Aplikasi Daerah	- Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	Tahun	250.000.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Jasa Appraisal / Penilai Tanah Pengadaan Tanah	Kegiatan	50.000.000
5	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	Sensus Tanah dan Bangunan	Obyek Pajak	50.000

F. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Tabel 116

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Alat Perekam Data (Tapping Box)	Unit	405.000

20. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

a. Honor Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 117

Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Petugas Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kejadian Bencana Daerah	Orang / Titik	150.000

21. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Pemeliharaan Jaringan, Service Alat Perekam KTP dan Pengiriman Berkas perihal Catatan Sipil

Tabel 118

Pemeliharaan Jaringan, Service Alat Perekam KTP dan Pengiriman Berkas perihal Catatan Sipil

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
----	--------	-------------	--------	------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengiriman POS	- Pengiriman Berkas Kependudukan	Kali	7.500
2	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi SIAK	Jasa Perawatan Jaringan Komunikasi SIAK	Bulan	10.000.000
3	Beban Pemeliharaan Service Alat Perekaman KTP-el	Beban Jasa Kantor Lainnya - Jasa Service Alat Perekaman KTP-el	Set	3.500.000
4	Pemeliharaan Jaringan System Aplikasi	Jasa Perawatan Jaringan System SIAK	Bulan	3.000.000

22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Beban Jasa Penyelenggaraan Acara

Tabel 119

Jasa Penyelenggaraan Acara

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jasa Penyelenggaraan Acara	Fasilitasi Penyelenggaraan* Seleksi CASN	Orang / Kegiatan	450.000

*\*BKPSDM*

23. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

a. Beban Jasa Tenaga Kesehatan

Tabel 120

Beban Jasa Tenaga Kesehatan

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kesehatan (Dokter Hewan Di luar Pegawai Pemerintah Kota Cilegon)	Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Hewan, Postmortem Anremortem Penyembelihan Hewan, Pengobatan Hewan, dan Kegiatan Sejenisnya di Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Orang / Hari	350.000

24. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. Honor Jasa Tenaga Penanganan Bencana

Tabel 121

Jasa Tenaga Penanganan Bencana

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Petugas Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kejadian Bencana Daerah	Orang / Titik	150.000

WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR